

Katalog: 4102004.6304
ISSN: 2776-8376

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

BPS KABUPATEN BARITO KUALA

2023

VOLUME 7, 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA

Katalog: 4102004.6304

ISSN: 2776-8376

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

BPS KABUPATEN BARITO KUALA

2023

VOLUME 7, 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Katalog : 4102004.6304

ISSN : 2776-8376

No. Publikasi : 63040.2327

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xx+ 102 Halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Pembuat Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Sumber Ilustrasi :

<https://www.canva.com>

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Pengarah

Toyib Nasikun, SST., ME

Penanggung Jawab

Toyib Nasikun, SST., ME

Penyunting

Kisfendie Regga R.I., SST

Penulis Naskah

Irma Fatichatul Barkiyah, SST

Pengolah Data

Irma Fatichatul Barkiyah, SST

Penata Letak dan Infografis

Fauzan Rais Arfizain, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan mengiringi terbitnya Publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022**”. Publikasi ini merupakan publikasi yang menyajikan data indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala beserta analisisnya.

Publikasi ini menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala antar waktu dan perbandingannya antar wilayah. Aspek yang disajikan adalah aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Aspek tersebut antara lain Kependudukan dan fertilitas, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, serta pola konsumsi dan kemiskinan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS), dan data dari berbagai sumber lain yang menunjang.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat berguna bagi para perencana pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya, semoga penerbitan publikasi ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Marabahan, Desember 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Toyib Nasikun, SST., ME.

NIP. 197706231999011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iiiiv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
KONSEP DAN DEFINISI.....	xi
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Sumber Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN	10
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	11
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	12
2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk	20
KESEHATAN.....	30
3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat	31
3.2 Kesehatan Balita	33
PENDIDIKAN.....	46
4.1 Angka Melek Huruf	47
4.2 Rata-rata Lama Sekolah.....	49

4.3	Tingkat Pendidikan.....	51
4.4	Tingkat Partisipasi.....	53
KETENAGAKERJAAN		60
5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61
5.2	Daya Serap Tenaga Kerja	65
5.3	Produktivitas Pekerja	68
5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	70
PERUMAHAN.....		75
6.1	Penguasaan Tempat Tinggal	77
6.2	Fasilitas Tempat Tinggal	78
POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN		88
7.1	Pola Konsumsi.....	88
7.2	Distribusi Pendapatan	93
7.3	Kemiskinan	96

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2020 (Jiwa)	12
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa).....	14
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2020	21
Tabel 2.4	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.....	25
Tabel 3.1	Angka Morbiditas dan Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020	32
Tabel 3.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2020	40
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.....	52
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	54
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.....	56
Tabel 5.1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat	

	Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	62
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020.....	66
Tabel 5.3	Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2020	68
Tabel 5.4	Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 7.1	Pengeluaran Makanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2020	91
Tabel 7.2	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 s.d. 2020.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 16
Gambar 2.2	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito per Kecamatan Tahun 2023 18
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2023 23
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023..... 24
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Saat Hamil Pertama, 2023 36
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun Menurut Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2023..... 37
Gambar 3.4	Persentase Perempuan Pernah Kawin 15-49 menurut Pendidikan dan Apakah Melahirkan di Faskes dan Ditolong Tenaga Kesehatan, 2023 39
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 42
Gambar 4.1	Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023..... 48
Gambar 4.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023 50
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2022..... 64

Gambar 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2018-2023 ...	71
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Kuala, 2023	77
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Barito Kuala, 2023.....	80
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2023	82
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Barito Kuala, 2023	83
Gambar 7.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s.d. 2023	90
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2018-2023	98
Gambar 7.3	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2023	99
Gambar 7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2023	100

KONSEP DAN DEFINISI

1. Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi RI selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- b. **Kepadatan Penduduk** adalah banyaknya penduduk per satuan wilayah dalam kilometer persegi.
- c. **Rata-rata Pertumbuhan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
- d. **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
- e. **Rumah Tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama atau makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.
- f. **Umur Median** digunakan untuk melihat struktur penduduk suatu wilayah, apakah relative "Tua atau Muda". Ditafsirkan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian, yaitu di atas atau di bawah umur tersebut.
- g. **Rasio Ketergantungan** menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun atau lebih).

2. Kesehatan

- a. **Angka Kesakitan/Morbiditas** adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit dan terganggu akibat keluhan tersebut.
- b. **Angka kontak** pada fasilitas pelayanan kesehatan digambarkan sebagai persentase penduduk yang pernah berobat jalan dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir.
- c. **Asi Eksklusif (*Exclusively Breastfeeding*)** menggambarkan tingkat kesadaran orang tua terhadap pemberian ASI yang benar, merupakan persentase balita yang diberi ASI tanpa makanan tambahan.

3. Fertilitas dan KB

- a. **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana umur istrinya antar 15-49 tahun.
- b. **Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (*Singulate Mean Age of Marriage = SMAM*)** adalah rata-rata seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan pertama kali.
- c. **Partisipasi KB** adalah proporsi peserta keluarga berencana (KB) aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).
- d. **Kontap** merupakan alat/cara KB yang bersifat permanen/mantap, meliputi : MOW,MOP,AKDR/IUD, dan Susuk/Implant.

4. Pendidikan

- a. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan pendidikan tersebut.
- b. **Angka Partisipasi Murni (APM)** merupakan persentase jumlah anak yang sekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah anak pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- c. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** menggambarkan proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
- d. **Angka Putus Sekolah (APts)** menunjukkan tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya. Perbandingan antara penduduk dalam kelompok umur tertentu yang putus sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok umur tersebut yang sedang sekolah pada jenjang tersebut.

5. Perumahan

- a. **Luas Lantai:** Luas Lantai yang ditempati dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebatas atap.
- b. **Fasilitas Air Minum:** Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.
- c. **Air Bersih** adalah air yang bersumber dari: air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak \geq 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.

- d. **Air Minum Layak** adalah air minum yang bersumber dari: air ledeng, sumur bor/pompa, air hujan, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.
- e. **Sanitasi Layak** adalah fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan kotoran.
- f. **Penerangan Listrik** adalah sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN dengan meteran atau tanpa meteran listrik maupun listrik non PLN (listrik tenaga surya, generator).

6. Ketenagakerjaan

- a. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.
- b. **Penduduk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
 - Bekerja, atau
 - Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau
 - Pengangguran.
- c. **Penduduk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
- d. Bersekolah, atau
- e. Mengurus rumahtangga atau
- f. Melaksanakan kegiatan lainnya.
- g. **Bekerja** adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula

kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

- h. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk mereka yang sedang libur sekolah.
- i. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang dalam mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Misalnya ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah meskipun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- j. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga termasuk didalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu, dan sejenisnya) dan penerima pendapatan atau pensiun yang tidak bekerja lagi selama seminggu yang lalu.
- k. **Pengangguran** adalah penduduk yang pada periode survei tidak bekerja dengan kegiatan:
 - g. Sedang mencari pekerjaan, atau
 - h. Sedang mempersiapkan usaha, atau
 - i. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau
 - j. Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
- l. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+).
- m. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah rasio antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

- n. **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), terdiri dari:
- k. **Setengah pengangguran** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)
- l. **Pekerja paruh waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela)
- o. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- p. **Sektor Pertanian (*Agriculture*)** meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, kehutanan, perburuan, subsektor peternakan dan perikanan.
- q. **Sektor Industri (*Manufacture*)** meliputi subsektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik dan Air Bersih, Bangunan
- r. **Sektor Jasa (*Services*)** meliputi subsektor Perdagangan, Rumah Makan, Angkutan, Keuangan, dan Jasa-jasa.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesejahteraan Rakyat di suatu daerah dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah Demografi dan Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pola Konsumsi dan Kemiskinan. Indikator yang dilihat pada pembahasan Demografi dan Kependudukan diantaranya adalah jumlah penduduk dan perkembangan (tren) penambahan penduduk. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Barito Kuala disajikan berdasarkan hasil proyeksi interim Sensus Penduduk 2020, yaitu 326.530 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102,47. Dilihat dari struktur penduduk yang tercermin dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Kuala masih termasuk piramida penduduk muda (*expensive*) ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi.

Indikator yang mewakili kesehatan salah satunya adalah angka morbiditas (kesakitan) yang menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut. Pada tahun 2023, angka kesakitan Barito Kuala sebesar 11,41 persen. Artinya, sekitar 11 dari 100 orang di Barito Kuala yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara itu, kesehatan Ibu dan Balita juga menjadi bagian dari indikator kesehatan. Sebesar 93,2 persen penduduk pernah kawin telah melahirkan di fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, 64,26 persen balita di Barito Kuala sudah mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2023.

Kesejahteraan masyarakat dari sisi pendidikan dapat dilihat diantaranya melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). RLS Barito Kuala tahun 2023 sebesar 7,74 persen. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 (dua) SMP saja atau putus sekolah dikelas 3 (tiga) SMP. Sementara itu, APS

Barito Kuala untuk usia 7-12; 13-15; dan 16-18 tahun masing-masing sebesar 98,77; 90,89; dan 73,86 persen. Lebih lanjut, APM Barito Kuala sebesar 98,77 untuk usia SD, 75,24 untuk usia SMP, dan 64,16 untuk usia SMA.

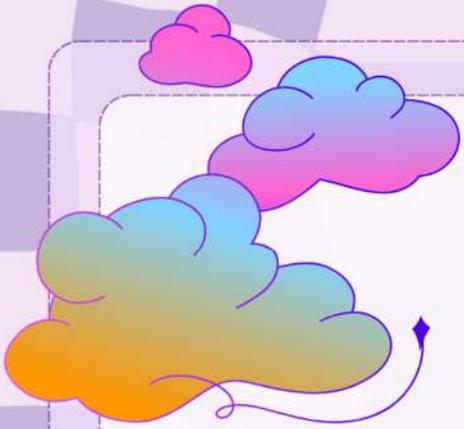
Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk dilihat berdasarkan jenis kegiatan utamanya untuk memperoleh persentase penduduk bekerja. Pada tahun 2022, proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berstatus bekerja sebesar 68,18 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, terdapat sebanyak 68 s.d. 69 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi atau masuk dalam dunia kerja. Sektor lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 42,75 persen. Jika diamati berdasarkan jenis pekerjaannya, pada tahun 2022 diantara penduduk Barito Kuala yang bekerja, terdapat 34,53 persen penduduk bekerja di sektor formal dan selebihnya 65,47 persen bekerja di sektor informal. Lebih lanjut, nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 sebesar 3,42 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 3 s.d 4 orang diantaranya adalah pengangguran.

Berdasarkan hasil Susenas 2023 Kabupaten Barito Kuala, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri yaitu sekitar 87,34 persen, sedangkan sisanya sebesar 12,66 persen masih bertempat tinggal di rumah sewa/kontrak, rumah dinas, dsb. Sementara itu, persentase rumah tangga menurut sumber air minum didominasi oleh mereka yang mengonsumsi Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya, sebesar 33,22 persen. Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga di Barito Kuala telah menggunakan penerangan listrik yang bersumber dari PLN yaitu sebesar 98,91 persen.

Pengeluaran konsumsi di Barito Kuala tahun 2022 masih didominasi dengan pengeluaran makanan yaitu sebesar 55,06 persen. Komoditas yang memiliki persentase terbesar untuk pengeluaran makanan adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 17,33 persen dari total makanan dan non

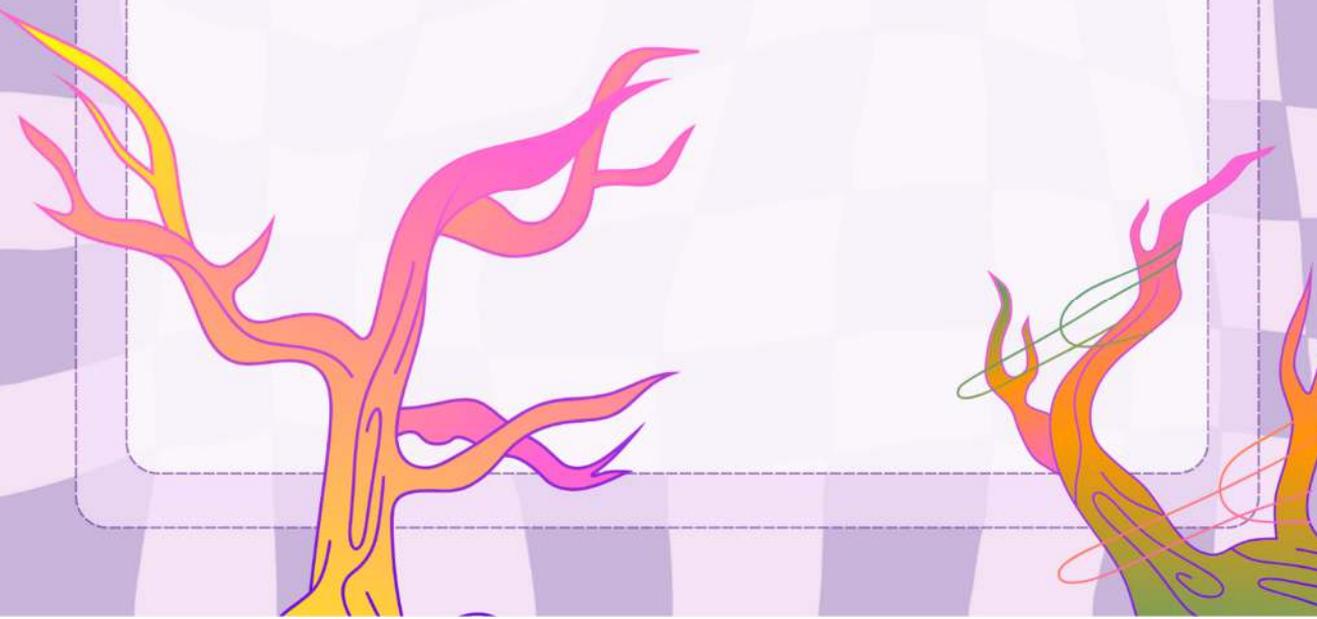
makanan. Sementara itu pada kelompok pengeluaran non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan sumbangan sebesar 23,27 persen dari total pengeluaran. Sementara itu, indikator kemiskinan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2020 diperoleh angka P0, P1, dan P2 berturut-turut sebesar 4,6; 1,14 dan 0,39. Angka tersebut dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp. 417.110. Sementara itu, Indeks Gini yang mencerminkan pendapatan penduduk, pada tahun 2022 sebesar 0,28.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



PENDAHULUAN

1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara (Pemerintah) dan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam program pembangunan sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Panjang (RPJM). Pembangunan didefinisikan sebagai suatu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi. Pembangunan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita.

Pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut, konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan ulang (*redefined*). Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang telah didefinisikan ulang tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut di antaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial—Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, dll—program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di semua bidang memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah, yang harus didukung oleh tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang sejauh mana capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Tanpa adanya dukungan data penting tersebut, para penentu kebijakan dan pembuat keputusan kemungkinan akan membuat kekeliruan dalam menentukan target, kebijakan, dan membuat program yang tidak cocok untuk kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang

terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan rakyat sangat diperlukan oleh para perencana, penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk: 1) menilai hasil dan distribusi kesejahteraan masyarakat; 2) memantau dampak sosial dari kebijaksanaan pembangunan; 3) untuk mengukur kondisi, keadaan, dan *trend* kesejahteraan penduduk serta untuk memantau perkembangannya sepanjang waktu; dan 4) untuk memantau kondisi dari kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Di Indonesia, data tentang karakteristik sosial masyarakat dikumpulkan melalui berbagai cara seperti Sensus Penduduk, Survei Penduduk antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari beberapa jenis sensus/survei tersebut diatas, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial kependudukan paling lengkap. Dari data yang dihasilkan, dapat disusun berbagai indikator sosial atau indikator kesejahteraan masyarakat seperti indikator di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, partisipasi ekonomi/ketenagakerjaan, kondisi dan fasilitas perumahan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, kemiskinan dan sebagainya.

1.2 Tujuan

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) dengan menggunakan berbagai indikator sosial, antara lain; Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, dan

Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Konsumsi/pengeluaran, dan indikator kesejahteraan lainnya.

Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi serta dinamika sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Lebih khusus lagi melihat tingkat kesejahteraan rakyat, sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan indikator kesejahteraan rakyat ini akan dibatasi untuk wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala. Karena keterbatasan jumlah sampel rumah tangga Susenas, maka data yang disajikan tidak seluruhnya bisa menampilkan angka sampai tingkat kecamatan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data jumlah dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;

2. Untuk materi kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi/ pengeluaran serta kemiskinan diperoleh dari Susenas 2020;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020.
4. Serta sumber data lainnya yang menunjang analisis baik dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

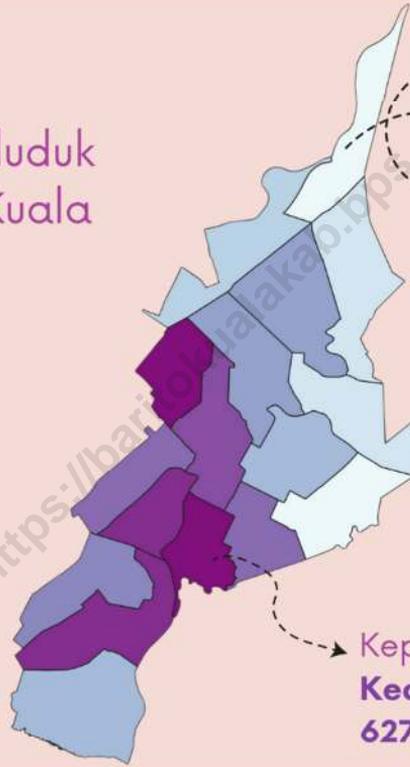
1. Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Sumber Data, serta Sistematika Penyajian
2. Bab II menyajikan tentang Demografi dan Kependudukan
3. Bab III menyajikan tentang Kesehatan
4. Bab IV menyajikan tentang Pendidikan
5. Bab V menyajikan tentang Ketenagakerjaan
6. Bab VI menyajikan tentang Perumahan
7. Bab VII menyajikan tentang Pola Konsumsi dan Kemiskinan
8. Bab VIII Menyajikan Kesimpulan

2

Demografi dan Kependudukan

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk
Kabupaten Barito Kuala
109 jiwa/km²



Kepadatan Terendah
Kecamatan Kuripan
17 jiwa/km²

Kepadatan Tertinggi
Kecamatan Alalak
627 jiwa/km²

Sex Ratio

102,47

Artinya Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan

Total Penduduk



326.530

BAB II

DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah modal dasar yang paling penting dalam pembangunan. Ibarat pisau bermata dua, penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial, namun di sisi lain keberadaan jumlah penduduk yang besar dapat merupakan beban bagi pembangunan. Penduduk merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk bukan saja merupakan pelaksana (subjek) melainkan juga sebagai sasaran akhir (objek) dari proses pembangunan. Penduduk yang besar akan menjadi potensi jika tersebar merata, berpendidikan, sehat, berdaya saing dan berbudaya. Kondisi sebaliknya terjadi jika penduduk yang banyak hanya menggerombol di suatu wilayah saja, berpendidikan rendah, sakit-sakitan, berdaya saing rendah dan rawan konflik sosial. Oleh karena itu, guna menunjang keberhasilan pembangunan, fokus perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan sebaiknya tidak hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk saja, melainkan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, perkembangan bidang kependudukan perlu diarahkan sehingga memiliki karakteristik yang dapat menunjang dan menguntungkan pembangunan. perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahannya mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk, dengan lingkungan hidup.

Berbicara masalah kependudukan tidak terlepas dari jumlah dan laju pertumbuhan, komposisi serta sebaran penduduk. Suatu analisis kependudukan menjadi penting, mengingat sifat profil penduduk yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan perjalanan waktu. Perubahan tersebut terjadi karena perubahan komponen penduduk, yaitu; kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan tersedianya data kependudukan, maka memungkinkan untuk dilakukan suatu analisis mengenai keadaan kependudukan di suatu daerah. Dengan demikian, perubahan penduduk yang terjadi antar waktu akan dapat diketahui dengan mudah.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada satu sisi, penduduk dapat menjadi modal besar bagi pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti, pangan, sandang, papan, akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan harus tercukupi agar tidak terjadi kasus busung lapar yang dapat meningkatkan risiko kematian penduduk. Penambahan jumlah penduduk juga harus searah dengan ketersediaan pemukiman yang layak agar tidak memunculkan pemukiman-pemukiman liar dan kumuh. Selain itu, sarana kesehatan dan pendidikan serta tenaga penunjangnya pun harus tersedia seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi interim SP2020, Penduduk Barito Kuala bertambah setiap tahunnya. Selama periode 2020-2023, terdapat penambahan sekitar 4,31 persen penduduk. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara umum di Kalimantan Selatan pada periode yang sama, yaitu sebesar 3,93 persen, terlihat bahwa penambahan penduduk di Barito Kuala lebih cepat

dibandingkan pertumbuhan rata-rata penduduk di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Hal tersebut dapat terjadi karena Barito Kuala merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi, Kota Banjarmasin, sehingga semakin banyak penduduk yang memilih untuk tinggal di wilayah ini, khususnya di daerah perbatasan dengan wilayah perkotaan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021, 2022 dan 2023 (Jiwa)

Jenis Kelamin	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	160 534	162 909	165 258
Perempuan	156 429	158 860	161 272
Total	316 963	321 769	326 530

Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Terlihat pada Tabel 2.1, jumlah penduduk Barito Kuala pada tahun 2021 sebanyak 316.963 jiwa, yang 50,64 persen diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 49,36 persen sisanya adalah penduduk perempuan. Pada tahun berikutnya, secara total penduduk bertambah sebanyak 1,56 persen menjadi 321.769 jiwa, dan pada tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 1,52 persen, jumlah penduduk menjadi 326.530 jiwa. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, pada periode 2021-2023 memiliki pola yang sama, yaitu lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Proporsi laki-laki yang lebih tinggi ini yang menjadikan nilai *sex ratio* di Barito Kuala selalu bernilai lebih dari 100. Pada tahun 2023, *sex ratio* di Kabupaten Barito Kuala adalah 102,47. Artinya, jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 s.d. 103 penduduk laki-laki. Jika dibandingkan dengan *sex ratio* pada tahun 2020 yang sebesar 102,69, 2021 (102,62) dan 2022 (102,54), nilai *sex ratio* cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan kata lain, pada periode 2020-2023

pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih cepat dibandingkan penduduk laki-laki.

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pada prinsipnya, penduduk akan tinggal di suatu wilayah yang dapat memberikan suatu kehidupan yang layak termasuk kemudahan mendapatkan sandang dan pangan. Persebaran penduduk yang merata antar wilayah secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan antarwilayah tersebut hampir mirip. Preferensi penduduk yang lebih memilih tinggal di suatu wilayah dengan segala fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan wilayah yang minim akses akan memunculkan masalah. Masalah tersebut adalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Demikian halnya dengan distribusi penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Wilayah dengan penduduk besar akan dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti pengangguran. Masalah tersebut terjadi akibat tidak memadainya lapangan pekerjaan yang tersedia karena terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak. Minimnya ketersediaan lahan pemukiman juga dapat menimbulkan pemukiman kumuh. Lebih lanjut, masalah yang mungkin dapat ditimbulkan dari ketidakmerataan distribusi penduduk adalah kurang memadainya akses ke sarana pendidikan dan kesehatan, rawan konflik sosial, dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, meskipun sebenarnya wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Imbasnya,

kemajuan perekonomian di wilayah tersebut biasanya cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lain dengan SDM yang lebih unggul. Penduduk Kabupaten Barito Kuala tersebar di 17 (tujuh belas) wilayah administrasi kecamatan dan 201 wilayah desa/kelurahan dengan luas wilayah sebesar 2.996,46 km².

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	10 321	10 386	9 962	10 035	20 283	20 421
Tamban	16 378	16 446	15 850	15 941	32 228	32 387
Mekarsari	9 260	9 369	8 892	8 979	18 152	18 348
Anjir Pasar	8 708	8 809	8 689	8 798	17 397	17 607
Anjir Muara	11 285	11 430	11 209	1 378	22 494	22 808
Alalak	33 243	33 979	32 269	32 972	65 512	66 951
Mandastana	9 209	9 423	9 110	9 337	18 319	18 760
Jejangkit	3 457	3 490	3 283	3 323	6 740	6 813
Belawang	7 047	7 110	6 804	6 866	13 851	13 976
Wanaraya	7 552	7 674	7 241	7 362	14 793	15 036
Barambai	8 076	8 172	7 995	8 116	16 071	16 288
Rantau Badauh	8 557	8 698	8 450	8 602	17 007	17 300
Cerbon	5 347	5 454	4 987	5 077	10 334	10 531
Bakumpai	5 611	5 699	5 210	5 277	10 821	10 976
Marabahan	11 230	11 403	11 386	11 591	22 616	22 994
Tabukan	4 644	4 700	4 605	4 669	9 249	9 369
Kuripan	2 984	3 016	2 918	2 949	5 902	5 965
BARITO KUALA	162 909	165 258	158 860	161 272	321 769	326 530

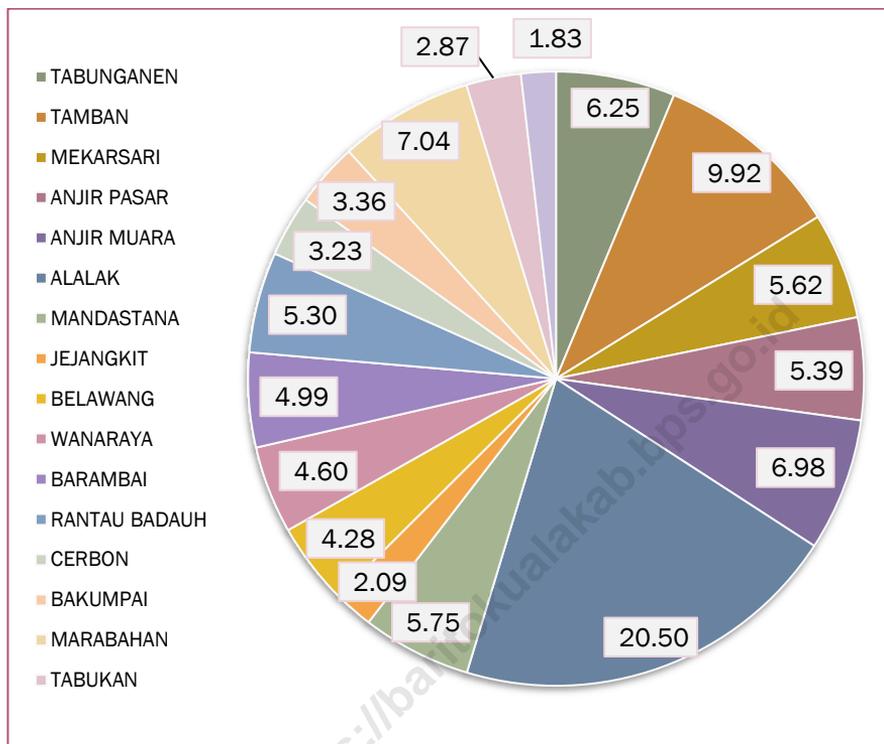
Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Berdasarkan Tabel 2.2., wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan proyeksi penduduk interim adalah Kecamatan Alalak yaitu dengan jumlah penduduk total sebanyak 65.512 jiwa (2022) dan 66.951 jiwa (2023). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua adalah Tamban yang dihuni 32.228 penduduk pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 32.387 jiwa di tahun 2023. Lebih lanjut, Kecamatan Marabahan sebagai Ibukota Kabupaten memiliki populasi sebanyak 22.616 jiwa pada tahun 2022 dan 22.904 jiwa di tahun 2023 menjadi wilayah pada urutan ketiga yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk di Marabahan, Kecamatan Anjir Muara menjadi wilayah terbesar keempat yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Tercatat sebanyak 22.494 jiwa di tahun 2022 yang berdomisili di Kecamatan ini, dan meningkat menjadi 22.808 jiwa di tahun 2023. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jejangkit dan Kuripan dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 6.813 dan 5.965 jiwa di tahun 2023.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala juga didominasi oleh penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang lebih dari 100. Nilai *sex ratio* diperoleh dengan membagi jumlah penduduk laki-laki per penduduk perempuan. Pada tahun 2023, terdapat 16 dari 17 Kecamatan yang nilai *sex ratio* nya lebih dari 100 atau jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hanya kecamatan Marabahan yang nilai *sex ratio* nya dibawah 100 yaitu 98,38, artinya pada tahun 2023, setiap 100 penduduk perempuan di Marabahan, terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Sementara itu, nilai *sex ratio* terbesar tahun 2023 adalah di Kecamatan Bakumpai yaitu sebesar 108 yang menunjukkan bahwa

pada 100 penduduk perempuan di wilayah tersebut, terdapat 108 penduduk laki-laki.



Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Gambar 2.1 Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

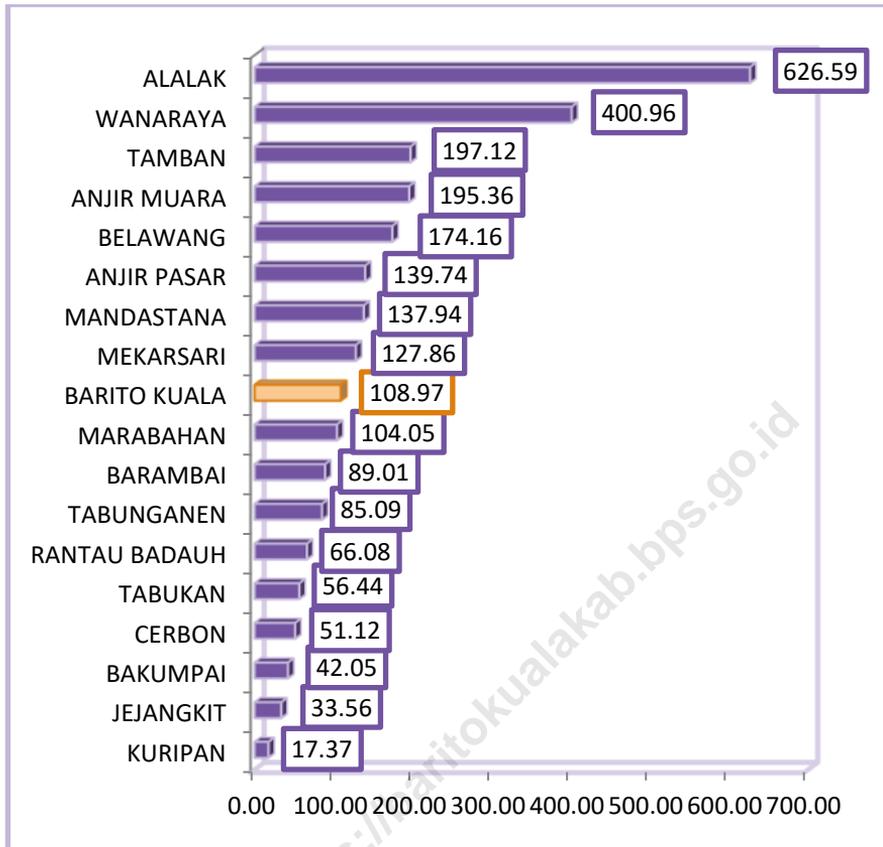
Dilihat dari komposisinya, persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala pada Gambar 2.1, distribusi penduduk terpusat pada beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Alalak, Tamban, Anjir Muara, Tabunganen, dan Marabahan. Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sekitar 20 persen atau seperlima jumlah penduduk Barito Kuala berada di wilayah ini. Selain itu, Kecamatan Tamban juga memiliki persentase yang cukup besar, yaitu 10 persen dari total penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Diikuti oleh Kecamatan Marabahan dan Anjir Muara dengan proporsi masing-masing sebesar 7 persen dari total penduduk. Sementara itu,

Kecamatan Jejangkit dan Kuripan yang menjadi dua wilayah dengan jumlah penduduk terkecil menyumbang masing-masing sebesar 2,09 dan 1,83 persen.

Alasan beberapa wilayah administrasi seperti Alalak, Tamban, dan Anjir Muara memiliki populasi penduduk yang cukup besar adalah selain wilayahnya yang cukup luas, letak geografis dari wilayah-wilayah tersebut juga relatif lebih dekat bahkan berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dibandingkan kecamatan lain. Selain itu, akses menuju Provinsi Kalimantan Tengah dari Kota Banjarmasin juga melewati wilayah-wilayah seperti Alalak dan Anjir Muara. Hal lain yang juga menjadi faktor pendukung banyaknya populasi, khususnya di Kecamatan Alalak adalah semakin menjamurnya perumahan baru yang dibangun di wilayah ini. Tidak sedikit penduduk wilayah lain lebih memilih untuk tinggal di Kecamatan Alalak karena alasan kedekatan dengan pusat kota tersebut.

Adapun Kecamatan Marabahan yang juga memiliki populasi cukup besar, merupakan Ibukota dari Kabupaten Barito Kuala yang terdapat pusat perekonomian dan pemerintahan di dalamnya. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan analisis diatas, dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di Barito Kuala masih belum merata. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan.

Dengan luas wilayah sebesar 2.996,46 km dan jumlah penduduk total sebanyak 326.530 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 sebesar 108,97 yang berarti bahwa setiap satu kilometer persegi wilayah dihuni oleh sekitar 104 s.d 105 penduduk. Grafik 2.2 berikut memberikan gambaran kepadatan penduduk per wilayah Kecamatan. Besaran kepadatan penduduk dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk pada tiap kecamatan dengan luas wilayah kecamatan.



Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Gambar 2.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan Tahun 2023

Data luas wilayah per kecamatan diperoleh dari Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang juga tersedia pada publikasi Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2023. Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dilihat bahwa selain menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, Kecamatan Alalak juga merupakan wilayah yang memiliki nilai kepadatan penduduk tertinggi dengan nilai 626,59. Artinya, pada tahun 2023 terdapat sekitar 627 jiwa yang tinggal di Kecamatan Alalak per satu kilometer persegi. Letak kecamatan Alalak yang strategis, yaitu yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin,

menjadikan wilayah ini memiliki perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Barito Kuala. Lebih lanjut, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup memadai menjadikan kecamatan ini menjadi pilihan untuk tempat tinggal dan menetap. Bahkan Kecamatan Alalak bisa dianggap menjadi wilayah penyangga untuk Kota Banjarmasin karena banyak penduduk yang setiap hari menjadi komuter untuk bekerja ataupun sekolah disana.

Selanjutnya, wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Wanaraya. Meskipun secara jumlah wilayah ini tidak terlalu banyak dibandingkan kecamatan lain, ternyata Kecamatan Wanaraya dapat dikatakan cukup padat dengan nilai 400,96. Artinya, setiap satu kilometer pada wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 400 s.d. 401 penduduk. Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar lainnya adalah Kecamatan Tamban, Anjir Muara, Belawang, Anjir Pasar, Mandastana, dan Mekarsari dengan kisaran angka kepadatan penduduk sekitar 127-197 jiwa per satu kilometer persegi.

Sementara itu, terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk dibawah nilai kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Kecamatan Marabahan, Tabunganen, Barambai, Rantau Badauh, Tabukan, Cerbon, Bakumpai, Jejangkit, dan Kuripan. Dari kesembilan wilayah tersebut, salah satunya adalah Kecamatan Marabahan yang sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten. Fakta menarik tentang Kecamatan ini adalah jika dibandingkan dengan kecamatan lain, wilayah ini masih belum terlalu padat dengan hanya dihuni oleh 104 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Kecamatan Marabahan tergolong luas namun masih terjadi pengelompokan tempat tinggal penduduk di wilayah tertentu seperti Kelurahan Marabahan Kota dan Kelurahan Ulu Benteng, sementara di desa lain, hanya dihuni oleh sebagian kecil penduduk saja. Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Kuripan yang ditinggali

sekitar 17 jiwa per satu kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Alalak, luas wilayah Kecamatan Kuripan sembilan kali lebih luas, yaitu sebesar 343 km². Akan tetapi, penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuripan jauh lebih sedikit dengan wilayah yang sangat luas tersebut, sehingga nilai kepadatannya sangat kecil. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang diminatinya wilayah ini untuk tempat tinggal, diantaranya karena keterbatasan akses jalan antar desa maupun akses menuju ibukota kabupaten yang sebagian besar menggunakan transportasi air dan aksesibilitas jaringan internet.

2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk antar satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Struktur umur dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan dalam segala bidang maupun dunia bisnis. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. *Sex ratio* (rasio jenis kelamin) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Nilai *sex ratio* diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Sehingga nilai *sex ratio* menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika nilai *sex ratio* lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2022 dan 2023

Kelompok Umur	2022		2023		Sex Ratio	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	13 392	13 025	13 390	13 037	102,82	102,71
5-9	15 035	14 433	14 818	14 223	104,17	104,18
10-14	14 025	13 657	14 496	14 188	102,69	102,17
15-19	13 491	12 214	13 547	12 238	110,46	110,70
20-24	12 687	11 733	12 672	11 674	108,13	108,55
25-29	13 134	12 251	13 210	12 297	107,21	107,42
30-34	12 747	12 445	12 788	12 455	102,43	102,67
35-39	12 762	12 593	12 915	12 724	101,34	101,50
40-44	12 482	12 448	12 567	12 530	100,27	100,30
45-49	11 144	11 397	11 382	11 664	97,78	97,58
50-54	9 987	9 842	10 280	10 162	101,47	101,16
55-59	8 110	7 541	8 396	7 821	107,55	107,35
60-64	5 911	5 884	6 218	6 223	100,46	99,92
65-69	4 145	4 164	4 343	4 383	99,54	99,09
70-74	2 130	2 545	2 414	2 797	83,69	86,31
75+	1 727	2 688	1 822	2 856	64,25	63,80
Barito Kuala	162 909	158 860	165 258	161 272	102,55	102,47

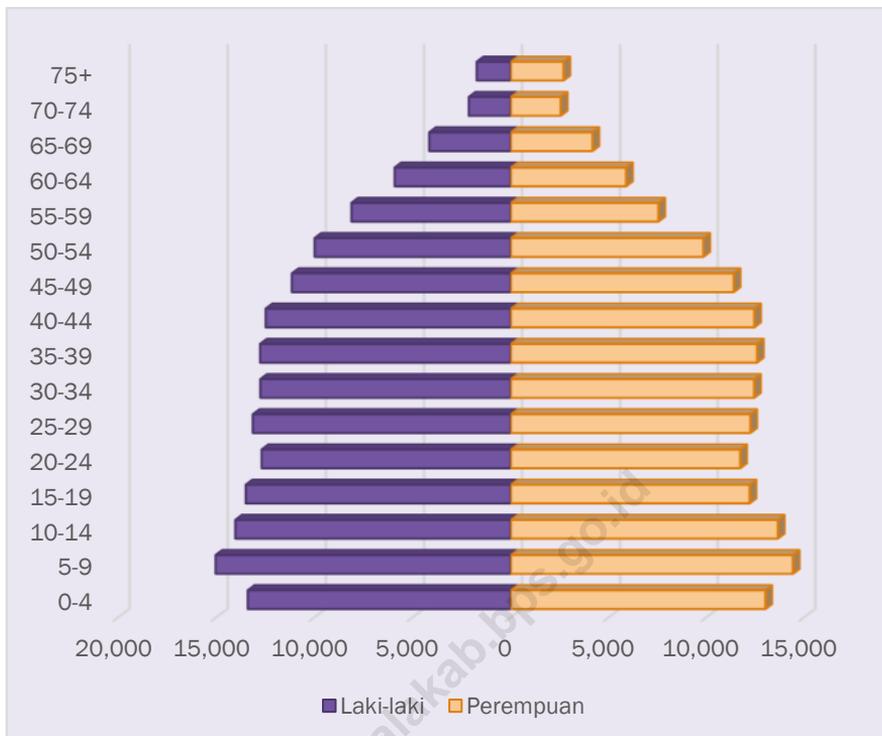
Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Berdasarkan Tabel 2.3, terlihat bahwa *sex ratio* di Kabupaten Barito Kuala bernilai lebih dari 100 pada sebagian besar kelompok umur, baik pada tahun 2022 maupun 2023. Jika dilihat lebih seksama, pada kelompok umur 0-4 tahun sampai dengan 40-44 tahun, nilai *sex ratio* lebih dari 100. Fakta ini menunjukkan bahwa pada usia muda, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Khususnya pada kelompok usia 15-19 tahun, 20-24 tahun dan 25-29 tahun, angka *sex ratio* diatas 107. Sebagai contoh pada tahun 2023, untuk penduduk usia 15-19 tahun, nilai *sex ratio* sebesar 110,46 menunjukkan bahwa pada kelompok usia tersebut, terdapat 110 s.d 111 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Kondisi yang serupa juga terjadi pada kelompok umur 50-54 dan 55-59 tahun, yaitu dominasi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yang ditandai dengan nilai *sex ratio* yang lebih dari 100.

Sementara itu, dominasi jumlah penduduk perempuan terlihat pada penduduk usia tua, yaitu pada kelompok 45-49 tahun dan 60 tahun keatas. Nilai *sex ratio* yang kurang dari 100, seperti contoh pada kelompok usia 75 tahun keatas yang nilainya 64,25 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jika terdapat 100 orang perempuan di Barito Kuala, terdapat 64 s.d. 65 orang penduduk laki-laki. Secara sekilas, semakin tua penduduk, semakin rendah pula angka *sex ratio*, yang juga mengindikasikan harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023 berdasarkan metode penghitungan baru menggunakan hasil Sensus Penduduk Long Form angka harapan hidup Barito Kuala adalah 72,28 tahun.

Perubahan pada struktur umur penduduk akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, serta proses perpindahan penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dari piramida tersebut akan diperoleh gambaran mengenai perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk kelompok anak-anak, usia produktif, dan lansia. Piramida penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.

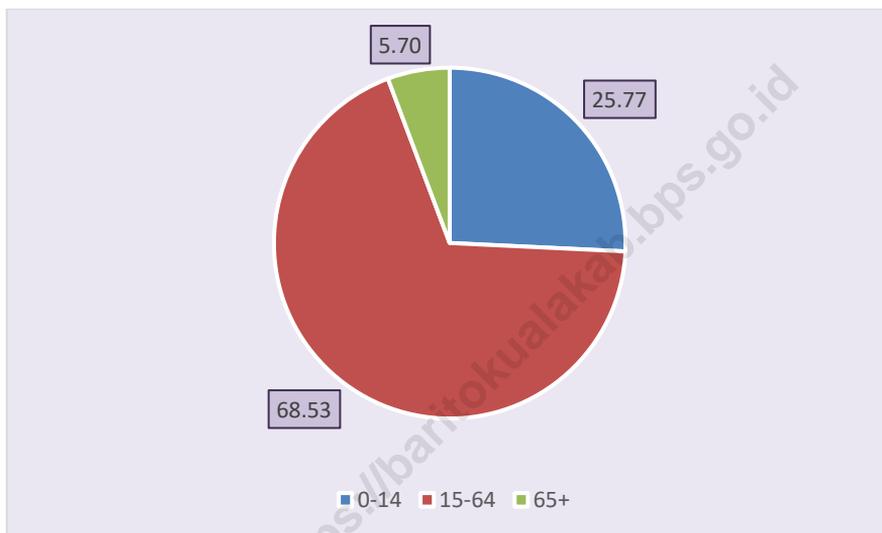


Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2023

Berdasarkan Gambar 2.3, piramida penduduk kabupaten Barito Kuala merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang ditandai dengan bagian dasar lebih lebar dari bagian puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 5-9 tahun sementara jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok usia 75 tahun keatas. Dengan struktur dominasi penduduk usia muda ini, maka di masa yang akan datang penduduk Kabupaten Barito Kuala akan didominasi oleh penduduk muda. Dominasi penduduk usia muda ini akan menjadi keuntungan bagi pembangunan jika pemerintah bisa mengelola sumber daya ini dengan baik. Pemanfaatan yang baik dalam arti menyediakan penunjang pendidikan yang cukup dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan

disamping menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, khususnya pada periode 8-12 tahun kedepan. Pada periode tersebut, kelompok usia penduduk yang memiliki jumlah penduduk terbanyak akan mulai memasuki usia kerja. Struktur umur penduduk dibagi menjadi kedalam tiga kelompok, yaitu 0 – 14 tahun, 15 – 64 tahun, dan 65 tahun keatas. Pembagian kelompok umur ini ditujukan untuk melihat rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*).



Sumber: Hasil Proyeksi Interim SP2020

Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak aktif secara ekonomi per 100 penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggung kehidupannya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk

usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Berdasarkan Gambar 2.4, dapat dilihat bahwa sebanyak 68,62 persen penduduk Barito Kuala merupakan penduduk yang ada pada usia produktif 15-64 tahun. Sementara 31,38 persen sisanya merupakan penduduk tidak produktif, yang terbagi menjadi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25,29 persen dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 5,41 persen. Dari data tersebut, secara umum jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak produktif. Secara umum, pada 100 orang penduduk, terdapat 69 orang penduduk yang produktif, sementara 31 orang sisanya tidak produktif. Dengan kata lain, perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif adalah sekitar 2:1. Untuk analisis lebih lanjut, Tabel 2.4 berikut akan menyajikan perbandingan angka rasio ketergantungan berdasarkan kategori Dependency Ratio dan Jenis Kelamin di Barito Kuala.

Tabel 2.4 Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2023

Rasio Ketergantungan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Youth Dependency Ratio (YDR)</i>	38,07	37,84	37,61
<i>Old Dependency Ratio (ODR)</i>	7,45	7,88	8,32
<i>Dependency Ratio (DR)</i>	45,52	45,72	45,93

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Depedency Ratio (DR) diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun) dengan jumlah penduduk pada usia produktif (15-64 tahun).

Secara umum, DR atau nilai ketergantungan sebesar 45,93 di tahun 2022 menunjukkan bahwa pada periode tersebut setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 s.d. 46 penduduk yang tidak produktif. Secara total, angka ketergantungan meningkat pada tahun 2023 jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Sementara itu, nilai rasio ketergantungan anak (YDR) diperoleh dengan membandingkan penduduk yang berusia 0-14 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka YDR sebesar 37,61 di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 38 anak dibawah 15 tahun yang belum produktif. Secara tren, angka YDR menurun pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi di 2021. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan jumlah kelahiran karena peningkatan jumlah penduduk usia muda yang non produktif lebih sedikit dibandingkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Sementara itu, ODR diperoleh dengan membandingkan penduduk usia lanjut (lebih dari 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif. Berdasarkan Tabel 2.4, rasio ketergantungan lanjut usia (ODR) tahun 2021-2023 masing-masing sebesar 7,45 dan 7,88, dan 8,32 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar tujuh hingga delapan orang orang lanjut usia. Peningkatan ODR yang cukup tinggi di tahun 2023 dari yang sebelumnya 7,88 menjadi 8,32 yang menjadikan kenaikan angka DR secara umum di tahun 2022. Kenaikan ODR ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat Dependency Ratio merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemajuan ekonomi suatu wilayah (Meiran, 2020). Berdasarkan kajian empirisnya, yang berpengaruh secara signifikan terhadap angka DR adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan usia kawin pertama. Semakin besar AKB dan semakin muda usia kawin pertama, maka rasio ketergantungan akan semakin tinggi.

Sehingga, fokus pengendalian DR dapat dilakukan dengan menekan AKB dan kebijakan yang berkaitan dengan usia kawin pertama.

Semakin tinggi rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif, misalnya untuk memenuhi konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban ketergantungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Untuk membandingkan struktur umur penduduk suatu wilayah yaitu apakah relatif lebih tua atau muda, maka secara cepat dapat digunakan umur median. Umur median dapat diartikan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian yaitu di atas dan di bawah umur tersebut. Bila umur median kurang dari 20 tahun, maka penduduk di suatu wilayah dikategorikan sebagai penduduk muda. Sementara itu, umur median yang berada diantara 20-30 tahun dikategorikan sebagai penduduk *intermediate*. Sedangkan umur median yang berada di atas 30 tahun, dikategorikan sebagai penduduk tua. Dengan perkataan lain, semakin tinggi umur median penduduk suatu wilayah, maka semakin tua struktur umur penduduknya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk di Kabupaten Barito Kuala tergolong sebagai penduduk *intermediate* dengan nilai umur median terdapat di kisaran 25-29 tahun di tahun 2023.

KESEHATAN

11,41%



Angka Morbiditas

Di tahun 2023, di Kabupaten Barito Kuala dari 100 orang terdapat 11 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari

Asuransi Kesehatan

53,32%

Lebih dari separuh penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 menggunakan **jaminan kesehatan** untuk berobat jalan



3

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB III

KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dan penting dalam pembahasan kualitas hidup dan kesejahteraan suatu wilayah. Begitu pentingnya kesehatan dalam menentukan kesejahteraan, indikator kesehatan dijadikan beberapa tujuan dan target yang ingin dicapai pada *Millennium Development Goals*, antara lain Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2020; Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2020; Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2020; dst.

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan mutu, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan sampai wilayah pelosok yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Keseriusan pemerintah pun ditunjukkan dengan semakin besarnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau. Bentuk realisasinya antara lain:

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin melalui program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda); menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan yang merata; meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit; menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis, lamanya bayi disusui, pemberian imunisasi, dan lain sebagainya.

3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat ini juga menjadi salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin baik derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah, mengindikasikan semakin baik pula tingkat kesejahteraannya. Demikian pula sebaliknya, derajat kesehatan masyarakat yang buruk, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraannya juga relatif rendah.

Indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan/morbiditas (*morbidity rate*). Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari-hari pada periode sebulan terakhir sebelum pencacahan. Keluhan kesehatan tersebut antara lain, panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang,

sakit gigi, ataupun keluhan kesehatan lainnya seperti lumpuh, pikun, stroke, mata katarak, dll.

Tabel 3.1 Angka Morbiditas dan Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022 dan 2023

Indikator	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Angka Morbiditas	7,91	11,41
Laki-laki	7,15	11,91
Perempuan	8,69	10,92
Persentase Penduduk Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	40,59	53,32
Laki-laki	39,23	51,52
Perempuan	41,97	55,06

Sumber : Hasil Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 7,91 dan 11,41 persen. Artinya pada tahun 2022, dari 100 orang penduduk terdapat sekitar 8 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut meningkat menjadi 11 s.d. 12 orang per 100 penduduk.

Jika diamati berdasarkan jenis kelaminnya, pada tahun 2022 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu lebih banyak dialami oleh penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Akan tetapi, pada tahun 2023, angka kesakitan penduduk laki-laki lebih tinggi (11,91) dibandingkan penduduk perempuan (10,92). Secara total, angka

kesakitan sebesar 11,41 persen dapat diartikan bahwa diantara 100 penduduk terdapat sekitar 11 s.d. 12 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan.

Berkaitan dengan angka morbiditas, kesehatan masyarakat biasanya dikaitkan dengan jaminan kesehatan yang dimiliki untuk mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud baik berupa PBI (Penerima Bantuan Iuran) Pemerintah maupun Non-PBI. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diperoleh persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan khususnya untuk berobat jalan. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui juga bahwa terdapat 53,32 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Barito Kuala menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022 yang bernilai 40,60 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan jaminan kesehatan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan BPJS kesehatan sebagai syarat wajib untuk mendapatkan layanan publik yang mulai digencarkan pada tahun 2022. Jika diamati lebih lanjut, pada tahun 2023, penduduk perempuan (55,06) yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan dibandingkan laki-laki (51,52).

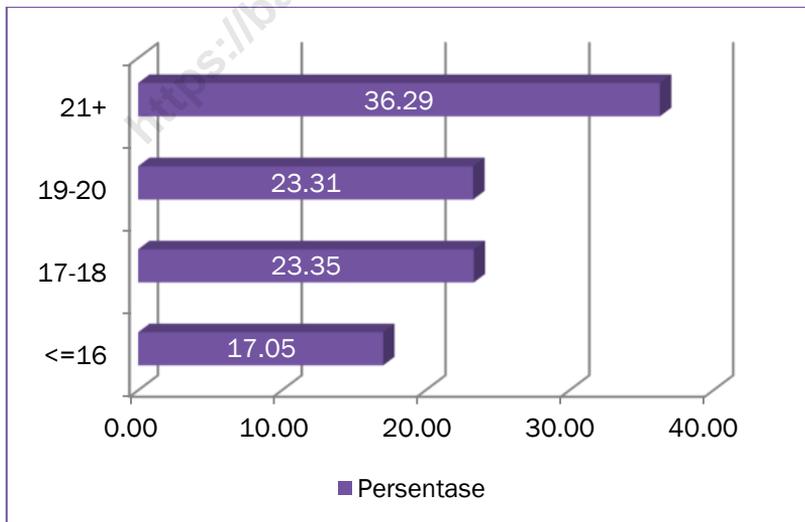
3.2 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita. Secara tidak langsung, fertilitas berkaitan erat dengan banyaknya bayi yang lahir hidup. Sehingga, fertilitas sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, fertilitas akan langsung memengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin besar angka

fertilitas di suatu wilayah, semakin besar pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas diantaranya adalah usia kawin pertama dan usia hamil pertama dari penduduk perempuan. Seperti pada hasil penelitian Arsyad dan Nurhayati, 2016 bahwa indeks kekayaan, jumlah anak mati, keterpaparan media, kontak dengan petugas KB, pendapat suami terhadap KB, hubungan seksual pertama kali (usia kawin pertama), usia melahirkan pertama, infertilitas dan keguguran merupakan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Angka Lahir Hidup.

Usia Kawin Pertama (UKP) yang dicakup dalam Susenas adalah umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif, artinya semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau dengan kata lain semakin banyak anak yang dilahirkan.



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2023

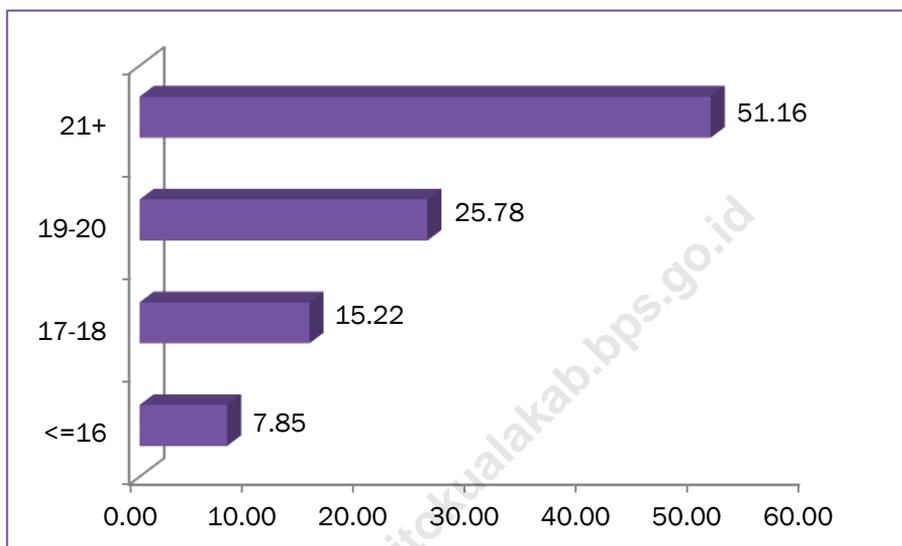
Usia kawin pertama yang ditetapkan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ketika perempuan sudah berusia minimal 16 tahun. Grafik berikut menampilkan kondisi perempuan 10 tahun keatas yang pernah kawin di Barito Kuala berdasarkan usia kawin pertamanya.

Berdasarkan Grafik 3.1, dapat dilihat bahwa sekitar sepertiga perempuan berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin di Barito Kuala secara rata-rata melangsungkan perkawinan pertama pada usia lebih dari 21 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar yaitu pada kelompok usia lebih dari 21 tahun, yang nilainya sebesar 36,29 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang nilainya 34,64 persen. Sementara itu, terdapat 23,31 persen penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah kawin yang melangsungkan perkawinan perkawinannya pada usia 19-20 tahun. Akan tetapi, masih terdapat 17,05 persen penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah kawin yang melakukan perkawinan pertama pada usia 16 tahun kebawah dan 23,35 persen pada usia 17-18 tahun. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin, sekitar 17 s.d. 18 orang diantaranya melangsungkan perkawinan pertamanya saat usia 16 tahun kebawah dan sekitar 23 orang diantaranya kawin pertama pada usia 17-18 tahun.

Fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya, mengingat berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengizinkan perkawinan setelah pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Secara total, pada tahun 2022 penduduk perempuan usia 10 tahun keatas yang pernah kawin yang umur perkawinan perkawinannya dibawah 19 tahun adalah 40,04 persen. Diharapkan dengan adanya peraturan baru ini, kondisi tersebut bisa dikendalikan, sehingga akan semakin sedikit persentase penduduk yang melangsungkan perkawinan pertamanya dibawah 19 tahun sebagai bentuk pengendalian jumlah penduduk.

Sejalan dengan usia kawin pertama, usia saat hamil pertama juga menentukan tingkat fertilitas. Semakin muda usia wanita yang

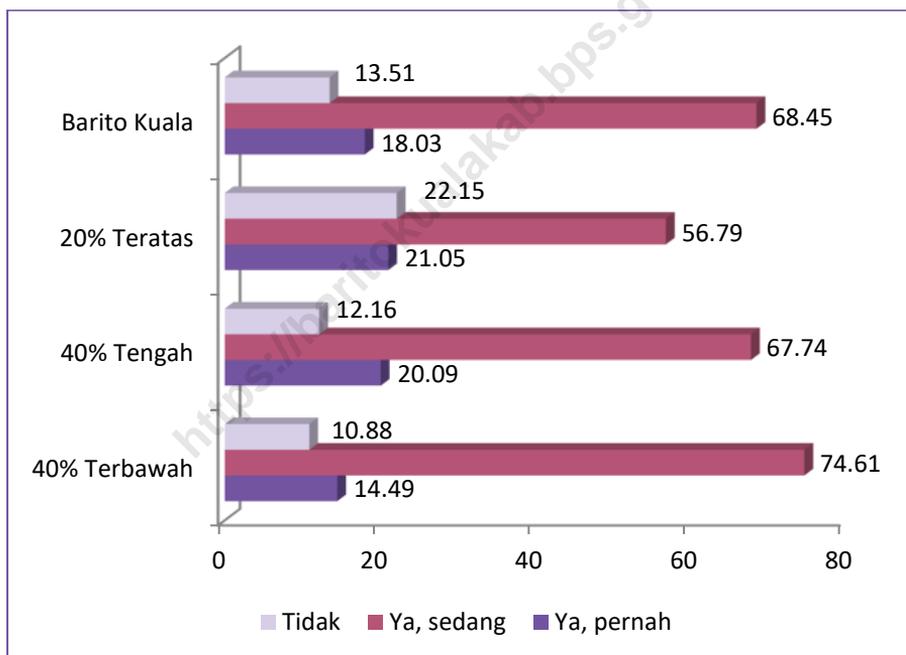
mengalami kehamilan pertama, semakin panjang masa reproduksi wanita tersebut. Sehingga jika pada suatu wilayah banyak wanita yang hamil pertama pada saat usia yang lebih muda, maka kemungkinan penambahan penduduk di wilayah tersebut juga semakin cepat.



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Saat Hamil Pertama, 2023

Berdasarkan Gambar 3.2, persentase tertinggi penduduk perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil adalah mereka yang mengalami kehamilan pertama pada usia 21 tahun keatas dengan nilai 50,16 persen. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 dari 100 perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil, terdapat sekitar 51 perempuan diantaranya mengalami kehamilan pertama pada usia 21 tahun keatas, sementara sisanya sekitar 49 orang berusia kurang dari 21 tahun saat mengalami kehamilan pertama. Lebih lanjut, kondisi yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah masih terdapat 7,85 persen perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil yang mengalami kehamilan pertama saat umurnya masih dibawah 16 tahun.

Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, pemerintah baik pusat maupun daerah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan penambahan penduduk agar tetap terkendali. Dalam rangka pengendalian kelahiran penduduk tersebut, program yang berkaitan adalah Keluarga Berencana (KB). Program yang sudah dicanangkan pada skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan penambahan penduduk di Indonesia secara khusus dirancang agar menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Wujud dari program ini adalah pemberian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan.



Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun Menurut Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2023

Bentuk Alat KB yang digunakan untuk pencegahan kehamilan sangat beragam, diantaranya adalah Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW, Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP, IUD/AKDR/Spiral, suntikan, pil, Kondom

Pria/Karet KB, dan Intravag/Kondom Wanita/Diafagma. Selain pengendalian/pencegahan kehamilan menggunakan alat KB modern, terdapat beberapa cara tradisional lain, diantaranya adalah metode menyusui alami, metode pantang berkala, dan metode lainnya.

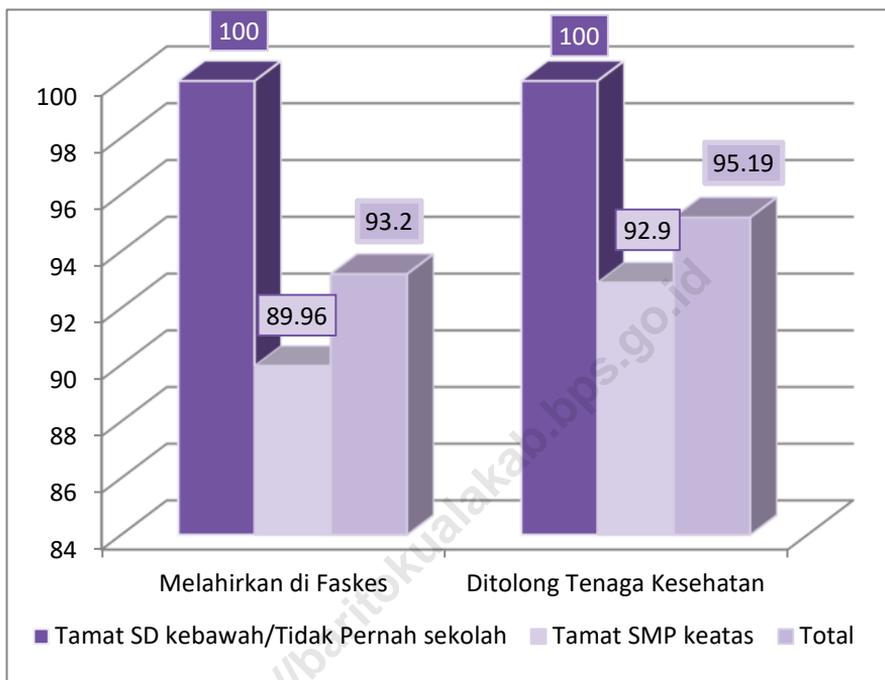
Gambar 3.3 secara umum menunjukkan bahwa terdapat 68,45 persen perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB, 13,51 persen yang pernah menggunakan dan sekarang sedang tidak menggunakan, serta terdapat 18,03 persen sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya andil pemerintah baik dalam pemberian pemahaman maupun memudahkan akses mendapatkan alat KB untuk mencakup lebih banyak perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang menggunakan alat atau minimal menerapkan cara KB tradisional agar kelahiran di Barito Kuala tetap terkendali.

3.3 Kesehatan Balita

Balita (bayi dibawah lima tahun) merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada masa balita ini merupakan usia emas (*Golden Age*) tumbuh kembang anak sehingga kecukupan asupan gizi dan kesehatannya harus terpenuhi untuk menjadikannya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Perhatian terhadap kesehatan balita harus dimulai sejak dalam kandungan, proses melahirkan dan proses menyusui. Proses persalinan berkaitan erat dengan keselamatan bayi yang dilahirkan dan sang ibu yang melahirkan. Penanganan yang tepat oleh tenaga penolong kelahiran yang berkualitas merupakan hal penting untuk mengurangi risiko kematian ibu maupun bayi.

Salah satu target MDGs di bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Cakupan persalinan yang tinggi dan memenuhi standar merupakan indikator pendekatan (*proxy*) dari angka kematian bayi. Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan

harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan memulai Program Jaminan Persalinan (Jampersal), yaitu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, postnatal dan keluarga berencana.



Sumber : Hasil Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 3.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin 15-49 menurut Pendidikan dan Apakah Melahirkan di Faskes dan Ditolong Tenaga Kesehatan, 2023

Berdasarkan hasil Susenas 2023, persentase perempuan pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Puskesmas, atau Tempat Praktek Tenaga Kesehatan) mencapai 93,2 persen dengan rincian seperti yang terlihat pada Gambar 3.4. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir sudah melahirkan di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, masih terdapat 7,8 persen diantaranya masih melahirkan di tempat selain fasilitas kesehatan. Sementara itu, perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan

dengan ditolong tenaga kesehatan sebesar 95,19 persen. Artinya, sebagian besar dari mereka sudah mendapat pelayanan tenaga kesehatan, sementara sisanya 4,81 persen belum ditolong oleh penolong persalinan dari tenaga kesehatan, misal dukun beranak, atau orang selain tenaga kesehatan.

Keterbatasan biaya, kebiasaan setempat, dan jauhnya akses terhadap fasilitas kesehatan di beberapa wilayah di Barito Kuala diduga menjadi faktor penyebab masih adanya pemanfaatan tempat melahirkan bukan fasilitas kesehatan seperti di rumah atau tempat lainnya. Umur Ibu, jumlah anak, status pekerjaan Ibu dan pengobatan sendiri juga merupakan *predisposing factors* yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Sementara determinan faktor pemungkin yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan penolong persalinan adalah status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan (Melani dan Nurwahyuni, 2022).

Selain menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu, Salah target lain dari MDGs di bidang kesehatan adalah menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah (BBLR) yaitu yang lahir dengan berat badan dibawah 2,5 kilogram. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 menghasilkan salah satu indikator yaitu berat lahir bayi dari perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan selama dua tahun terakhir.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi Ketika Dilahirkan, 2022-2023

Indikator	< 2,5 kg		≥ 2,5 kg	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barito Kuala	4,47	12,47	95,53	85,20

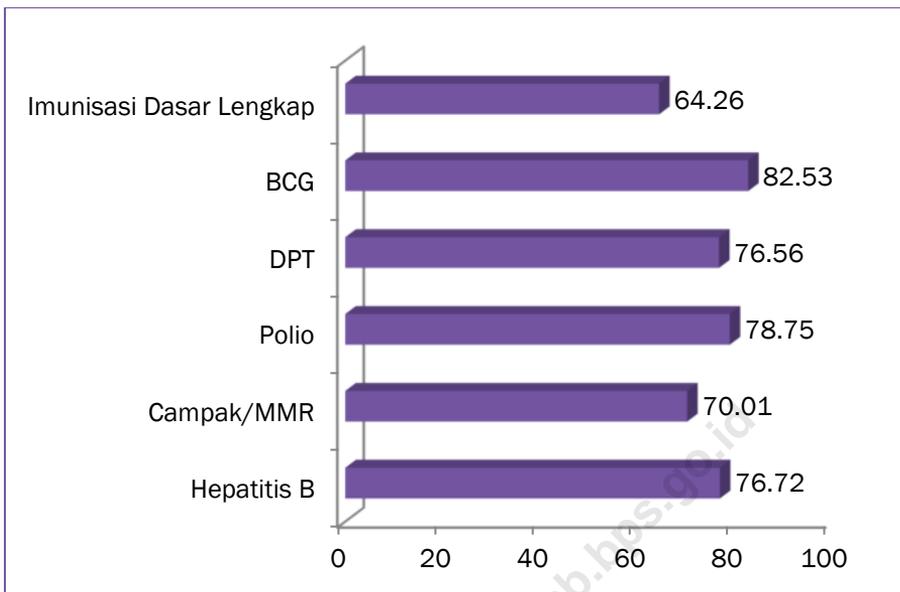
Sumber : Hasil Susenas 2021-2022, BPS Kabupaten Barito Kuala

*sebanyak 4,83 persen tidak ditimbang/tidak tahu

Berdasarkan Tabel 3.2., dapat dilihat bahwa di Kabupaten Barito Kuala bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat 85,20 persen perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan bayi dengan berat badan 2,5 kg ke atas. Angka ini sudah menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang dilahirkan dalam keadaan baik. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisi di 2022, terjadi penurunan yang sebelumnya mencapai 95,53 persen. Kondisi kesejahteraan keluarga tidak menjadi faktor penentu satu-satunya yang mempengaruhi persentase BBLR, mengingat terdapat berbagai faktor lain seperti usia ibu, pendidikan, adat istiadat, agama, dan lain lain juga menjadi pendukung idealnya berat badan bayi yang dilahirkan.

Dari segi kesehatan anak, pencegahan penyakit sejak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan imunisasi pada balita. Imunisasi adalah pemberian suatu vaksin dalam tubuh seseorang dengan maksud meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit tertentu. Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir sedangkan imunisasi aktif adalah kekebalan yang didapatkan dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Imunisasi harus diberikan secara lengkap sesuai dengan umur anak. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai penyakit. Jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada balita adalah BCG, DPT, Campak/morbili, dan Hepatitis B.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum terdapat 87,24 persen balita di Barito Kuala memiliki Kartu Imunisasi (KIA)/KMS/Kartu berobat/dokumen lain, baik yang dapat diunjukkan maupun tidak. Sementara sisanya sebesar 12,76 persen tidak memiliki, seperti yang terlihat pada Grafik berikut.



Gambar 3.5 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 3.5 terdapat sebanyak 64,26 persen balita yang mendapatkan imunisasi lengkap (1x BCG, 3x Polio, 3x DPT, 1x Campak, dan 3x Hepatitis B). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 63,76 persen. Akan tetapi, kondisi ini dapat terjadi karena memang masih belum memenuhi kriteria umur untuk diberikan imunisasi tertentu. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, balita perempuan memiliki persentase imunisasi dasar lengkap yang lebih besar (71,15 persen) dibandingkan balita laki-laki (57,37 persen). Sementara itu jika dilihat berdasarkan kelompok pendapatan, penduduk pada kelompok 20 persen tertinggi memiliki persentase imunisasi dasar lengkap yang paling tinggi yaitu sebesar 80,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan kesadaran akan pemberian imunisasi yang lengkap untuk balita.

Gambar 3.5 juga menunjukkan persentase balita yang menerima imunisasi jenis tertentu. Pada tahun 2023, di Barito Kuala terdapat 82,53 persen balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG. Sementara itu, pencapaian pemberian imunisasi ke Balita untuk imunisasi DPT dan Polio pada tahun 2023 masing-masing sebesar 75,56 persen dan 78,75 persen. Sedangkan untuk imunisasi campak/morbili sebesar 70,01 persen dan hepatitis B sebesar 76,62 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Balita di Barito Kuala yang belum mendapatkan imunisasi jenis tertentu. Untuk campak/morbili misalnya, masih terdapat sekitar 29 s.d. 30 balita yang belum mendapatkan vaksin campak/morbili diantara 100 balita. Begitu pula untuk jenis vaksin DPT, dari 100 balita di Kabupaten Barito Kuala, masih terdapat sekitar 23 s.d. 24 balita yang belum mendapatkan vaksin DPT di tahun 2023. Untuk vaksin DPT, seharusnya balita sudah diberikan imunisasi primer pada saat usia 2-6 bulan, sedangkan untuk vaksin campak primer MR dapat diberikan ketika balita usia sembilan bulan. Dengan adanya hasil tersebut, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada balita agar dapat mendapatkan vaksin primer yang lengkap untuk pencegahan dini yang optimal dari jenis penyakit-penyakit tersebut.



AMH (ANGKA MELEK HURUF)



Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

95,87%

Pada 100 penduduk Kabupaten Barito Kuala yang berusia 15 tahun ke atas di tahun 2023, terdapat 95 sampai 96 orang yang mampu membaca dan menulis huruf latin

BAB IV

PENDIDIKAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu pokok dalam pembangunan nasional bersama-sama dengan isu pembangunan ekonomi. Pertama, pendekatan pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut maupun relatif. Sebaliknya, pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjanjikan adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pemerataan pendapatan. Kedua, pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu bangsa di ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan komparatif seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi akan lebih ditentukan oleh keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karenanya pendidikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi instrumen yang sangat penting untuk diperhatikan.

Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Mengenai pentingnya pendidikan telah banyak dikupas dalam teori yang cukup terkenal, yaitu *Human Capital Teory*. Teori ini berangkat dari suatu anggapan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar

mutu dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Alokasi dana pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahun anggaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain sebagai salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

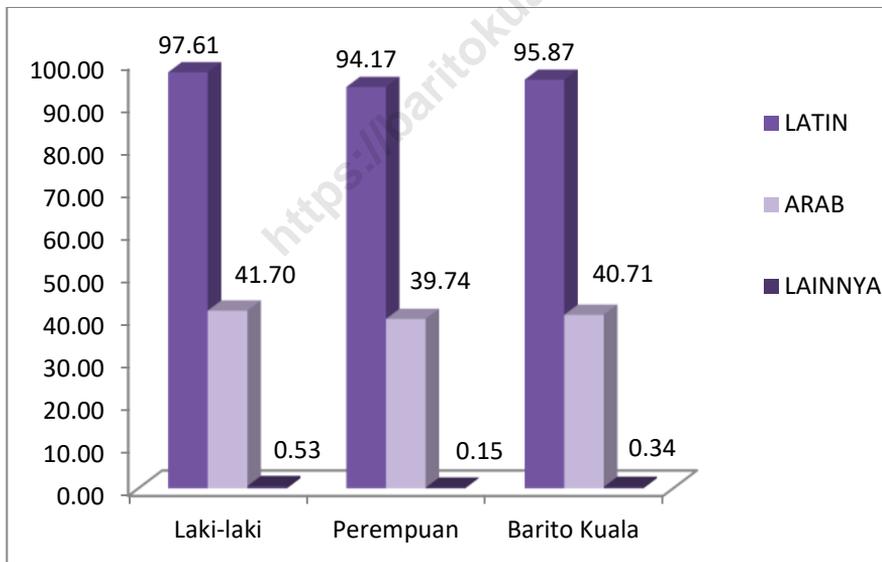
Pendidikan merupakan salah satu komponen dari indikator kesejahteraan rakyat yang harus mendapatkan perhatian sangat serius. Semakin baik tingkat pendidikan penduduk, maka semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan penduduk Kabupaten Barito Kuala melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut di olah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS.

4.1 Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, salah satu ukuran mendasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Penduduk harus mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis agar dapat menerima berbagai informasi secara

tertulis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menulis yang dicerminkan oleh indikator melek huruf merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk agar dapat menggapai hidup sejahtera.

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat membaca dan menulis baik menggunakan huruf latin dan/atau huruf arab dan/atau huruf lainnya seperti aksara jawa, kanji, dll. Semakin meningkatnya angka melek huruf berarti semakin menurunnya angka buta huruf. Baik Angka Melek Huruf (AMH) maupun Angka Buta Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf merupakan perbandingan banyaknya penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.



Sumber : Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.1 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Gambar 4.1 memberikan gambaran persentase angka melek huruf berdasarkan jenis kelamin dan secara total. Berdasarkan data tersebut, secara umum, persentase penduduk 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin adalah 95,87 persen. Artinya, pada 100 penduduk usia 15 tahun keatas di tahun 2023, terdapat sekitar 95 s.d 96 orang diantaranya bisa membaca dan menulis huruf latin. Dengan interpretasi yang sama, pada setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas, 40 s.d 41 orang diantaranya bisa membaca dan menulis huruf arab.

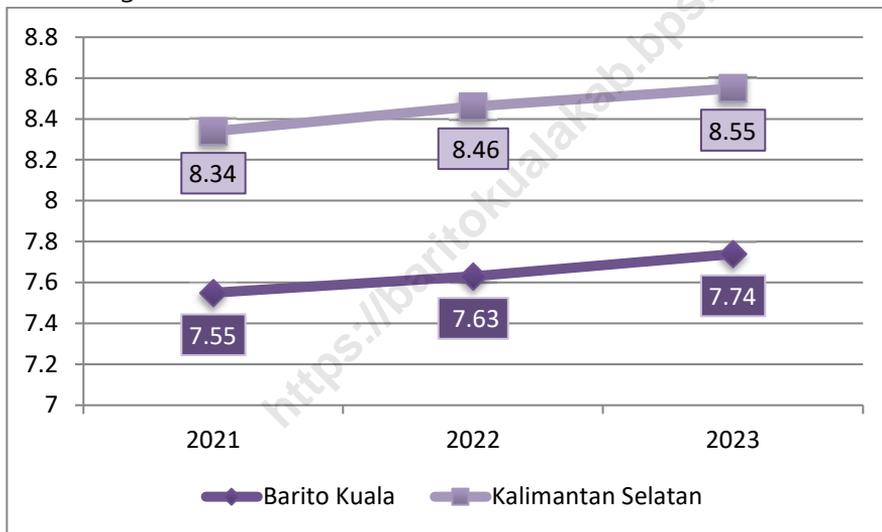
Jika diamati berdasarkan kelompok jenis kelamin, angka melek huruf untuk setiap jenis huruf penduduk laki-laki nilainya lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Sebagai contoh untuk AMH huruf latin untuk laki-laki sebesar 97,61 persen sementara perempuan 94,17 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada 100 orang penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas, hanya sekitar 2 diantaranya yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin. Berbeda dengan kelompok penduduk perempuan, dari 100 orang 5 diantaranya buta huruf latin.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hak dasar kebutuhan manusia. Target *Millineum Development Goals* (MDGs) menetapkan tercapainya 50 persen peningkatan angka melek huruf orang dewasa pada tahun 2020, dengan penekanan khusus pada kemampuan membaca dan menulis bagi perempuan. Penduduk perempuan 15 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis kebanyakan berada pada kelompok usia 50 tahun keatas. Memang cukup sulit untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lain yang bisa melihat mutu sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (*Means*

Years School) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. Semakin lama sekolah yang dilalui diharapkan semakin bagus kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam penghitungan indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*) dan maksimum lama sekolah yang harus dicapai adalah 25 tahun atau paling tidak penduduk telah menamatkan suatu jenjang akademi. Pada tahun 2023, dilakukan penyesuaian komponen IPM, termasuk RLS yang disesuaikan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form.



Sumber : Penghitungan Metode Baru IPM, BPS RI

Gambar 4.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021-2023

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Barito Kuala cenderung lebih rendah dibandingkan angka di Provinsi Kalimantan Selatan. RLS Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah 8,55 tahun. Sementara itu, pada tahun yang sama RLS Barito Kuala adalah 7,74 tahun, seperti yang terlihat pada Gambar 4.2.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2023 sebesar 7,74 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala baru mampu menempuh pendidikan sampai 7 tahun atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP saja dan putus sekolah dikelas 2 (dua) SMP. Sementara itu, jika dilihat tren atau perkembangannya, angka RLS di Barito Kuala mengalami peningkatan dari tahun 2021. Akan tetapi, pada periode yang sama, angka RLS di Barito Kuala masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka RLS di Kalimantan Selatan yang sudah mencapai delapan tahun. Fenomena ini perlu menjadi perhatian pemerintah jika ingin meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicerminkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia, mengingat RLS adalah salah satu unsur penyusun IPM untuk dimensi pendidikan. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat diantaranya adalah memastikan anak usia sekolah untuk tetap bersekolah hingga minimal 9 tahun, selain itu bagi penduduk yang usia 25 tahun keatas yang putus sekolah, didorong untuk mengikuti Paket B atau C.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari status pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, seseorang diharapkan memiliki pengetahuan serta kemampuan dan keahlian yang lebih baik. Meningkatnya keterampilan seseorang akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	4,26	4,54	4,40
Masih Bersekolah	22,12	24,08	23,11
SD/Sederajat	13,14	12,54	12,83
SMP/Sederajat	3,69	3,87	3,78
SMA/Sederajat	4,63	6,06	5,34
Perguruan Tinggi	0,67	1,60	1,14
Tidak Bersekolah Lagi	73,61	71,37	72,48
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 4.1., pada tahun 2023, penduduk usia 5 tahun keatas yang masih bersekolah mencapai 23,11 persen secara total. Sementara itu, sebesar 4,4 persen tidak/belum pernah sekolah dan 72,48 persen sudah tidak bersekolah lagi. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya pada penduduk 5 tahun keatas yang masih bersekolah, terdapat 12,83 persen masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat, 3,78 persen pada jenjang SMP/ sederajat, 5,34 persen di jenjang SMA/ sederajat, dan 1,14 persen berada pada jenjang perguruan tinggi.

Lebih lanjut, jika diamati berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, secara umum persentase penduduk perempuan yang masih bersekolah lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang SD atau

sederajat persentase penduduk laki-laki lebih tinggi, namun pada tingkat SMP/ sederajat ke atas, persentase penduduk perempuan yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka yang cenderung tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/ sederajat lebih banyak berjenis kelamin laki-laki.

Sementara itu untuk penduduk yang belum/ tidak pernah sekolah, persentase penduduk perempuan (4,54) lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (4,26). Lebih lanjut, sebagian besar penduduk 5 tahun keatas di Barito Kuala adalah mereka yang sudah tidak bersekolah lagi, yaitu sebesar 72,48 persen secara umum. Termasuk didalamnya adalah mereka yang sudah lulus sekolah dan pada saat pendataan tidak sedang bersekolah. Persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lagi sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

4.4 Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak serta merta dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator tingkat partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan

tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan kedua indikator tersebut setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Jenis Kelamin	APS		
	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	98,41	85,88	66,06
Perempuan	99,15	95,07	81,87
Barito Kuala	98,77	90,89	73,86

Sumber : Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Barito Kuala telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2., APS Barito Kuala usia 7-12 tahun mencapai 98,77. Artinya, terdapat sekitar 98 dari 100 penduduk usia 7 s.d. 12 tahun (usia SD) sedang menjalani pendidikan atau masih bersekolah, baik jenjang SD maupun lebih. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS pada usia 7-12 tahun penduduk perempuan (99,15) lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki (98,41). Lebih lanjut, pada penduduk yang berusia 13-15 tahun (usia SMP), angka partisipasinya adalah 90,89 secara keseluruhan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada kelompok ini APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang masing-masing nilainya 95,07 dan 85,88 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pendidikan wajib belajar 9 tahun di Barito Kuala dapat dikatakan sudah cukup berhasil karena APS tingkat SD melampaui 95 persen, dan APS tingkat SMP sudah melampaui 70 persen.

Pada kelompok penduduk 16-18 tahun, APS tahun 2023 mencapai 73,86 persen. Berbeda dengan kelompok penduduk usia SD dan SMP, capaian APS pada kelompok ini masih tergolong cukup rendah. Dengan hasil tersebut, artinya masih terdapat sekitar 16 dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sedang bersekolah baik formal maupun nonformal. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup terlihat antara APS laki-laki (66,06) dengan APS perempuan (81,87) pada kelompok usia SMA ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan cenderung dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Meskipun dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun, pemerintah Barito Kuala perlu lebih bekerja keras untuk mendorong partisipasi khususnya untuk penduduk usia 16-18 tahun dalam rangka menyukkseskan Program Pendidikan 12 tahun.

Indikator pendidikan penting lainnya untuk melihat penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Pada APM usia

anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah diluar sistem pendidikan seperti menunda saat mulai sekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah sementara waktu, dan lulus lebih awal. Indikator ini sudah memperhitungkan usia standar seorang anak dalam menempuh pendidikan, usia 7 s.d. 12 tahun untuk sekolah SD sederajat, 13 s.d. 15 tahun untuk SMP sederajat dan 16 s.d. 18 tahun untuk SMA sederajat. Misal APM siswa SD adalah angka yang membandingkan jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD dengan jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 tahun secara keseluruhan.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Jenis Kelamin	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	98,41	72,19	51,75
Perempuan	99,15	77,79	76,91
Barito Kuala	98,77	75,24	64,16

Sumber : Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Data Susenas, APM SD pada tahun 2023 adalah 98,77 persen. Artinya, dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 2 anak yang tidak sedang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar. Sementara itu, untuk APM SMP secara umum di Barito Kuala adalah 75,24 persen. Dengan kata lain, terdapat 75 diantara 100 penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Sementara sisanya, sekitar 25 penduduk usia yang sama

namun tidak sedang bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Lebih lanjut APM Barito Kuala 2023 sebesar 64,16. Artinya, sekitar 64 penduduk yang berusia 16-18 sedang bersekolah di tingkat SMA/sederajat, sementara sisanya sebanyak 36 penduduk pada usia yang sama tidak sedang bersekolah di tingkat SMA/sederajat. Termasuk didalamnya adalah mereka yang belum/tidak pernah bersekolah, yang masih bersekolah namun diluar tingkat SMP atau sederajat karena tinggal kelas atau bersekolah di tingkat SMA/sederajat dan mereka yang putus sekolah.

Berdasarkan Data Tabel 4.3, dapat dilihat juga bahwa APM penduduk perempuan di semua jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 hampir semua penduduk (99,15 persen) perempuan usia 7-12 tahun sedang bersekolah di tingkat SD atau sederajat, sementara untuk penduduk laki-laki dengan usia yang sama, terdapat sekitar 2 anak yang tidak sedang bersekolah pada jenjang SD/sederajat. Sementara itu, APM SMP penduduk perempuan (77,79) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 78 dari 100 perempuan 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat, sementara sisanya 22 orang tidak sedang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat. Untuk kelompok umur yang sama pada penduduk laki-laki, sekitar 72 dari 100 berusia 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang SMP/sederajat dan sisanya 28 orang tidak sedang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat.

Lebih lanjut, APM SMA laki-laki sebesar 51,75 persen menunjukkan bahwa 52 dari 100 penduduk laki-laki usia 16-18 tahun masih bersekolah di tingkat SMA/sederajat, sedangkan untuk penduduk perempuan pada usia yang sama, terdapat sekitar 77 dari 100 penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMA/sederajat. Sementara sisanya, sekitar 48 penduduk laki-laki dan 23 penduduk perempuan yang tidak sedang bersekolah di jenjang SMA/sederajat. Hal ini bisa terjadi karena usia masuk sekolah yang terlalu cepat atau adanya keterlambatan karena tinggal kelas atau yang lainnya.

5

KETENAGAKERJAAN

Jenis Data : Persentase

Level : Kabupaten

Tahun : 2023

Usia : 15 Tahun ke Atas

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA



JENIS KEGIATAN UTAMA SEMINGGU YANG LALU



SEKTOR LAPANGAN USAHA PEKERJAAN UTAMA



BAB V

KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan perekonomian nasional. Khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Titik sentral pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup: 1) penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan; 2) penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal; 3) terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai "*human capital*". Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula. Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah lain di Indonesia. Permasalahan itu berkaitan dengan tingkat pengangguran, jumlah jam kerja, dan ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Akibatnya, beberapa sektor ketenagakerjaan yang potensial tidak berkembang secara optimal. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut maka perlu disusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang terpola dan terpadu. Hal ini menuntut tersedianya data dan informasi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Barito Kuala. Indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun tingkat pengangguran. Indikator-indikator tersebut dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun. Pada tahun 2020, BPS tidak bisa melaksanakan kegiatan Sakernas Tahunan karena ada penghematan APBN. Dampaknya adalah data ketenagakerjaan tahun 2020 sampai level kabupaten/kota tidak bisa disajikan. Oleh karena itu, dalam publikasi ini akan menyajikan data ketenagakerjaan tahun 2020.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ketenagakerjaan seperti TPAK

ataupun yang lainnya dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, yaitu penduduk dengan kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti: pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2023

	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	70,74	71,89
Bukan Angkatan Kerja (%)	29,26	28,10
Total	100,00	100,00

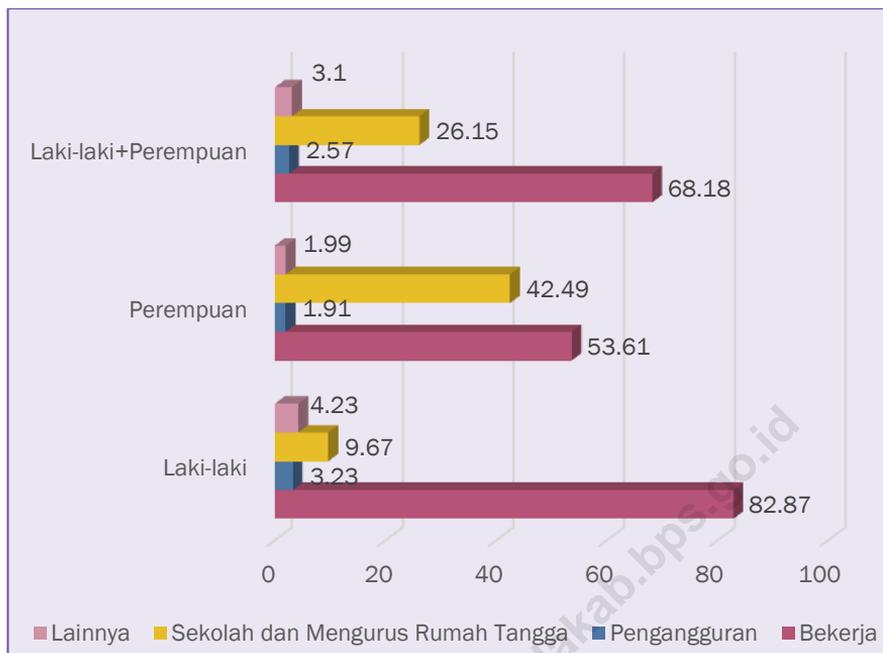
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2023

Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja/sementara tidak bekerja dan pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, nilai TPAK Barito Kuala secara umum adalah sebesar 71,89 persen. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk 15 tahun

keatas, 71 s.d 72 orang diantaranya terlibat dalam perekonomian baik bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun mencari pekerjaan. Sementara sisanya yaitu sebesar 28 orang adalah mereka yang bukan termasuk angkatan kerja seperti sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lainnya. Jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022, TPAK meningkat dari yang sebelumnya sebesar 70,74 persen. Artinya, pada tahun 2023 semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Konsep bekerja yang digunakan dalam Sakernas adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu yang lalu. Termasuk didalamnya kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Sementara itu, pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berkaitan dengan penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, sekolah yang dimaksud dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk menempuh pendidikan di sekolah formal, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sementara itu, mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang untuk mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah (tidak termasuk pembantu/asisten rumah tangga). Untuk mengetahui lebih rinci, berikut disajikan grafik yang menggambarkan kondisi penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan kegiatan utama dari hasil Sakernas Agustus 2022.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2022

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2022

Berdasarkan Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa secara umum pada tahun 2023, dari sebanyak 71,89 persen penduduk yang terlibat aktivitas ekonomi, sebesar 68,18 persen diantaranya bekerja dan sebanyak 2,57 persen menganggur. Sementara untuk bukan angkatan kerja, 26,15 persen penduduk memiliki kegiatan utama sekolah/mengurus rumah tangga dan sisanya yang menghabiskan waktu terbanyak untuk kegiatan sekolah dan mengurus rumah tangga sebanyak 3,1 persen. Sederhananya, jika terdapat 100 penduduk, pada Agustus 2023 terdapat 68 orang bekerja, 3 orang pengangguran, 26 orang yang sekolah/mengurus rumah tangga dan 3 orang memiliki aktivitas utama lainnya.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, pada tahun 2022 penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan

perempuan. Pada 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas, 83 orang diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja, 10 orang sekolah atau mengurus rumah tangga, 3 orang diantaranya pengangguran, 4 orang sisanya adalah penerima pendapatan. Sementara pada 100 penduduk perempuan usia 15 tahun atau lebih yang memiliki kegiatan utama bekerja sebanyak 54 orang. Selanjutnya 42 orang diantaranya menghabiskan waktu terbanyaknya untuk sekolah atau mengurus rumah tangga. Sementara itu 2 orang diantaranya pengangguran dan 2 orang lainnya merupakan penerima pendapatan. Proporsi penduduk yang bekerja pada kelompok penduduk laki-laki (82,87 persen) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan (53,61 persen). Sementara itu, proporsi kegiatan utama sekolah atau mengurus rumah tangga penduduk perempuan (42,49 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,67 persen). Hal ini sejalan dengan kondisi yang pada umumnya terjadi bahwa laki-laki akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja sementara perempuan akan lebih banyak mengurus rumah tangga sebagai kegiatan utama, bahkan meskipun memiliki pekerjaan.

5.2 Daya Serap Tenaga Kerja

Persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Sektor lapangan usaha secara garis besar terbagi kedalam tiga kategori, yaitu pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan); industri (pertambangan, penggalian, industri, dan konstruksi); dan jasa (perdagangan, jasa, dan lainnya). Untuk lebih mengetahui gambaran penyerapan tenaga kerja di Barito Kuala berdasarkan sektor lapangan usaha dan jenis kelamin, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2022

Sektor Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Barito Kuala
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	44,77	39,65	42,75
Pertambangan, Penggalian, Industri, dan Konstruksi	21,11	9,91	16,68
Perdagangan, Jasa, dan lainnya	34,12	50,44	40,57
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah Sakernas, 2022

Berdasarkan Tabel 5.2, sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian. Pada tahun 2022, sektor pertanian mampu menyerap 44,77 persen tenaga kerja, menurun 6,46 poin dari tahun 2021 yang persentasenya sebesar 49,21. Artinya, pada tahun 2022 setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, 45 orang diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Jika dicermati, penyerapan tenaga kerja laki-laki di sektor ini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk usia 15 tahun keatas bekerja di sektor tersebut, dan diantara mereka secara jumlah lebih banyak penduduk laki-laki. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi. Namun terdapat kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut dengan nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga tingkat produktivitasnya cenderung rendah.

Lapangan usaha kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan, jasa, dan lain-lain dengan penyerapan sebesar 40,57 persen, meningkat 4,51 poin dibandingkan persentase pada tahun 2021. Sementara itu, pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Konstruksi, serta Listrik Air dan Gas tahun 2022 dapat menyerap 16,68 persen dari total jumlah penduduk 15 tahun yang bekerja. Angka ini meningkat 1,95 poin dari tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan persentase sektor pertanian dan peningkatan sektor industri dan jasa mulai menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Barito Kuala.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, pada sektor pertanian penyerapan penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Begitu juga yang terlihat pada sektor pertambangan, industri manufaktur, dsb. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan di lapangan usaha tersebut cenderung lebih berat seperti buruh pertanian, buruh angkut pada penggalian pasir, buruh pabrik industri penggilingan padi, dan sejenisnya yang memerlukan lebih banyak tenaga laki-laki dibandingkan perempuan. Berbeda dengan sektor pertanian dan industri, penyerapan pada lapangan usaha jasa, persentase penduduk perempuan lebih besar. Sekitar separuh penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja, mencari penghasilan di sektor perdagangan dan jasa ini, mengingat secara tenaga tidak dibutuhkan terlalu banyak aktivitas fisik dibandingkan di sektor pertanian dan industri.

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar serta penduduk yang bekerja dengan status bekerja sebagai buruh, karyawan dan pegawai. Sedangkan sektor informal adalah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh atau karyawan tidak

dibayar, pekerja keluarga, pekerja bebas dan lainnya. Persentase penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2022

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	17,33	21,36	18,92
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	25,20	15,57	21,39
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,56	1,86	2,89
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,80	25,26	31,64
Pekerja Bebas	10,22	2,43	7,14
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	7,89	33,52	18,01
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2022

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa secara umum hampir sepertiga (31,64 persen) penduduk 15 tahun yang bekerja pada tahun 2022 berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya. Selanjutnya, sebesar 21,39 persen dari penduduk 15 tahun yang bekerja berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Karena dominasi penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pada sektor pertanian yang memang sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor tersebut memiliki dan mengelola lahan pertanian sendiri namun masih membutuhkan buruh untuk membantu pada tahap tanam dan panen. Selain itu, anggota rumah tangga seperti istri

dan anak biasanya membantu mengelola lahan pertanian, dimana keluarga yang membantu berstatus pekerja tidak dibayar. Sementara itu pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 18,92 persen, dan sisanya sebanyak 7,14 dan 2,89 persen berstatus sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian dan berusaha dibantu buruh dibayar.

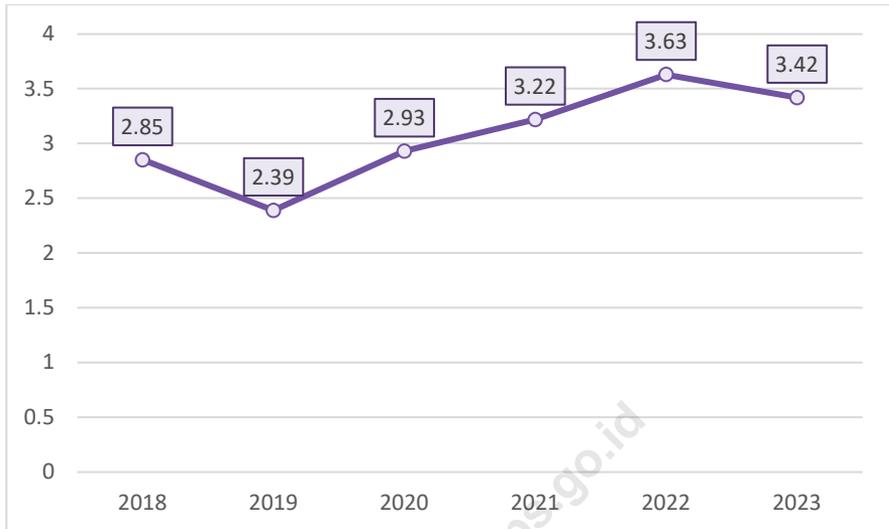
Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, pada tahun 2022 penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase sebesar 35,80 persen. Sama dengan kondisi secara umum, persentase kedua terbesar juga status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Lebih lanjut, berusaha sendiri, pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh dibayar memiliki persentase masing-masing sebesar 17,33; 10,22 dan 3,56 persen. Akan tetapi, berbeda dengan penduduk laki-laki, pada kelompok penduduk perempuan, mayoritas perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, yaitu sebesar 33,52 persen. Artinya sepertiga dari pekerja perempuan adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Mereka memiliki aktivitas bekerja namun tidak mendapatkan balas jasa atau memperoleh pendapatan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Diikuti oleh mereka yang bertatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, dengan nilai sebesar 25,26 persen. Lebih lanjut, sebanyak 21,36 persen pekerja perempuan usia 15 tahun keatas di Barito Kuala yang memilih untuk berusaha sendiri, dengan menanggung risiko dan tanpa dibantu pekerja lain. Selanjutnya, untuk mereka yang berstatus pekerja bebas dan berusaha dengan dibantu buruh dibayar masing-masing sebesar 2,43 dan 1,86 persen.

Jika dilihat berdasarkan pengelompokan sektor formal dan informal, persentase pekerja yang berada di sektor formal (status sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu pekerja

tetap/dibayar) sebesar 34,53 persen. Sementara sisanya sebesar 65,47 persen berada di sektor informal. Dominasi sektor informal sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dimana mayoritas pekerjaannya berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, bekerja sendiri, ataupun pekerja bebas. Selanjutnya, jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, baik penduduk laki-laki maupun perempuan juga didominasi oleh pekerja di sektor informal dengan persentase masing-masing sebesar 60,64 dan 72,88 persen.

5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja. Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.



Sumber : Olah Sakernas Agustus 2018-2023

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2018-2023

Berdasarkan Gambar 5.3 berikut, pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala secara umum adalah 3,42 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 3 s.d. 4 orang diantaranya adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan TPT tahun 2022 yang nilainya sebesar 3,68 persen, angka TPT secara umum dapat dikatakan menurun. Jika dilihat secara tren, TPT mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020 saat terjadinya wabah Covid-19. Kenaikan tersebut berlangsung hingga tahun 2022. Penurunan angka TPT yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sudah mulai kembali normal. Kedepannya, diharapkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan terserapnya tenaga kerja bisa terus ditingkatkan agar angka pengangguran tetap terkendali pada persentase yang rendah.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

Perumahan



87,34%

Rumah Tangga yang sumber energinya berasal dari PLN

Rumah Tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri

98,91%



BAB VI

PERUMAHAN

Kebutuhan akan perumahan (papan) merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang disamping kebutuhan pangan dan sandang, Arti fisik perumahan/pemukiman adalah tempat tinggal individu/anggota masyarakat yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat tinggal atau hunian yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, rumah seharusnya mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya sekaligus harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini, Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh dan berkembang, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, selayaknya sebuah rumah memiliki bentuk fisik dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga dapat memperoleh hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas SDM.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal

mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No. 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Menurut Krieger dan Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan fasilitas terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan tersedianya pelayanan sosial.

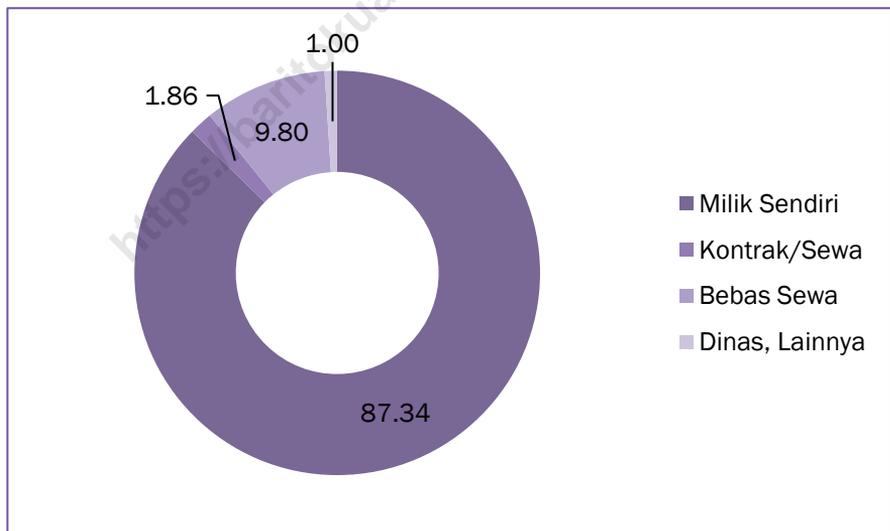
Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah, Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Penilaian terhadap kondisi pemukiman yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya: status penguasaan rumah tempat tinggal; kualitas material perumahan seperti atap, dinding dan lantai terluas; fasilitas penunjang yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas

perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Persentase rumah milik sendiri ini menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan pokok hidupnya, yaitu papan (tempat tinggal).



Sumber: Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Berdasarkan Gambar 6.1, Kabupaten Barito Kuala pada, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri yaitu sebesar 87,34 persen. Selain rumah milik sendiri, terdapat sebanyak 12,66 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah selain milik sendiri (termasuk didalamnya yang kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas/lainnya).

Dari hasil Susenas juga disebutkan bahwa dalam satu bangunan, terdapat sekitar 1-2 keluarga. Disebutkan juga bahwa sebesar 46,82 persen rumah tangga di Barito Kuala memiliki luas lantai rumah 50-99 meter persegi. Sementara 38,34 persen rumah tangga memiliki rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi, sisanya sebesar 14,84 persen memiliki luas lebih dari 100 meter persegi.

Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri secara umum mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan, khususnya di daerah yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan yang berada di Ibukota Kabupaten. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

6.2 Fasilitas Tempat Tinggal

Tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, penerangan, bahan bakar memasak maupun pelayanan sosial. Penyediaan berbagai macam fasilitas penunjang rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang dapat menyediakan fasilitas penunjang tempat

tinggal yang memadai tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup bagus. Selain itu, kelengkapan fasilitas tempat tinggal suatu rumah akan menentukan kenyamanan tempat tinggal yang akan berdampak pada kualitas rumah itu sendiri.

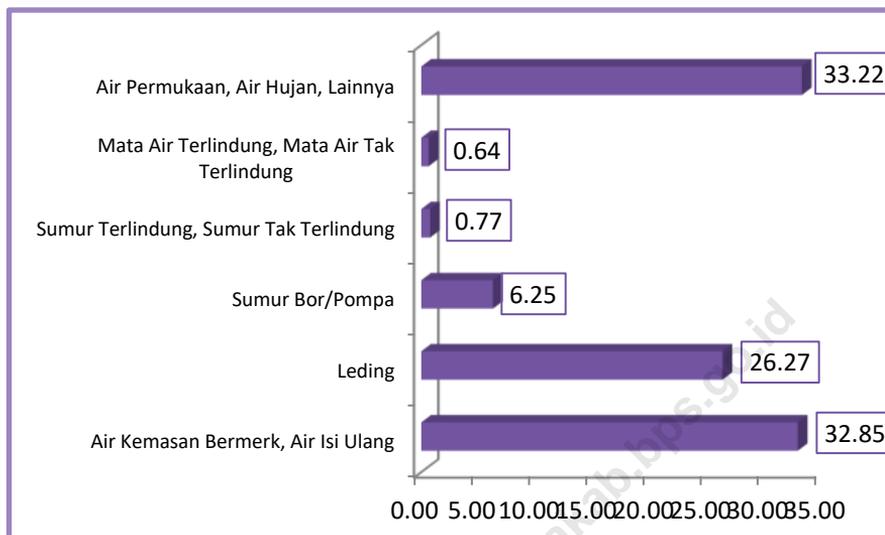
Atap, Dinding, dan Lantai Terlulus

Sumber Air Minum

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia, Dari Pengertian dan Definisi Air maka dapat di ambil kesimpulan bahwa salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air bersih merupakan air yang harus bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air merupakan zat kehidupan, di mana tidak ada satu pun makhluk hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan air.

Salah satu kelengkapan fasilitas rumah tangga adalah tersedianya fasilitas air minum yang memadai. Sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, ledeng dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter dikategorikan sebagai sumber air minum bersih. Selanjutnya, sumber air minum yang berasal dari ledeng, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter dikategorikan dalam sumber air minum layak. Selain itu terdapat juga sumber air minum utama yang berasal dari air hujan dan air permukaan seperti dari sungai, danau, dan sejenisnya. Gambar berikut

menyajikan persentase penggunaan air minum rumah tangga berdasarkan sumber air minum utama di Barito Kuala tahun 2022.



Sumber: Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Berdasarkan Gambar 6.2., terlihat bahwa persentase terbesar penggunaan air minum rumah tangga di Barito Kuala tahun 2023 adalah air permukaan/air hujan/lainnya, yaitu sebesar 33,22 persen, diikuti oleh air kemasan bermerk/air isi ulang sebanyak 32,85 persen, dan air leding sebesar 26,27 persen. Hasil Susenas 2023 juga menunjukkan bahwa setidaknya 35,70 persen rumah tangga di Barito Kuala tahun 2023 masih belum terpenuhi sumber air minum bersih dan sekitar 41,82 persen belum mendapatkan akses terhadap sumber air minum layak. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mengakses air bersih maupun air layak di Kabupaten Barito Kuala dikarenakan sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber minum yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori air minum bersih maupun air minum layak. Hal ini patut jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan program penyediaan air bersih khususnya di daerah perdesaan sehingga dapat mewujudkan program

Millenium Development Goals (MDGs) tujuan 7 yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Perkembangan pembangunan dunia yang berarah kepada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dimana salah satu tujuannya adalah mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Fokusnya tidak hanya penggunaan air bersih saja tetapi air minum layak.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu indikator perumahan yang berhubungan dengan sanitasi adalah keberadaan tempat buang air besar (BAB). Indikator ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat pada kesehatan. Fasilitas buang air besar (jamban) merupakan salah satu sarana pokok untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Tersedianya fasilitas yang memadai akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan pribadi manusia. Oleh karena itu, peningkatan jenis fasilitas buang air besar dan peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya sarana ini harus terus disampaikan secara persuasif dan intensif.

Jamban yaitu suatu pembuangan yang digunakan oleh keluarga atau sejumlah keluarga untuk buang air besar. Cara pembuangan tinja, prinsipnya yaitu: kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah, kotoran manusia tidak mencemari air permukaan/air tanah, kotoran manusia tidak dijamah lalat, jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu, konstruksi jamban tidak menimbulkan kecelakaan, dan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).



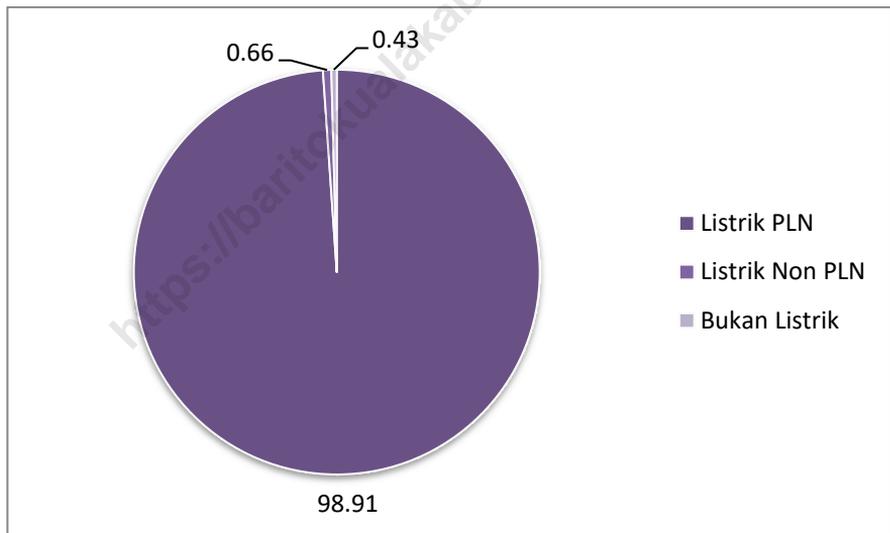
Sumber: Olah Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Berdasarkan Gambar 6.3, pada tahun 2023 di Kabupaten Barito Kuala terdapat 70,07 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sementara rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air yang digunakan bersama sebanyak 18,61 persen, dan sebanyak 10,02 persen rumah tangga menggunakan MCK komunal/umum. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan jenis klosetnya, 64,51 persen rumah tangga sudah menggunakan leher angsa, sementara 35,49 persen sisanya menggunakan plengsengan maupun cumplung/cubluk. Sementara itu, berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, terdapat 63,20 persen rumah tangga yang sudah menggunakan tangki septik/IPAL, dan 36,80 persen sisanya dibuang ke kolam/lahan/sungai, lubang tanah, kebun, tanah lapang, dan lainnya.

Penerangan

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya fasilitas penerangan yang memadai. Fasilitas penerangan rumah terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) dan yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk yang tidak menggunakan penerangan. Pemakaian penerangan berupa listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya.



Sumber: Susenas 2023, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Berdasarkan Gambar 6.4, ditinjau dari sumber penerangan utama yang menggunakan listrik, mayoritas rumah tangga (98,91persen) di Barito telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Sementara itu, terdapat sebesar 0.66 persen rumah tangga

menggunakan listrik yang bukan bersumber dari PLN seperti genset pribadi atau sejenisnya. Lebih lanjut, terdapat 0,43 persen rumah tangga yang masih belum menggunakan listrik seperti menggunakan lampu minyak atau sejenisnya. Jika dibandingkan dengan kondisi penerangan di tahun 2022, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik yang bersumber dari PLN meningkat dari yang sebelumnya 98,63 menjadi 98,91 persen. Rumah tangga yang tidak menggunakan listrik diantaranya karena wilayah tempat tinggal yang belum terjangkau atau memang rumah tangga tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya pemasangannya.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

POLA KONSUMSI & KEMISKINAN

Persentase Pengeluaran Konsumsi Perkapita Kabupaten Barito Kuala 2023



VS



Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Kuala 2018-2023



<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB VII

POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN

7.1 Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan/penghasilannya. Pada kenyataannya sangat sulit untuk mendapatkan data pendapatan/penghasilan penduduk melalui sebuah survei. Hambatan teknis pada saat wawancara ialah adanya kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi, penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan melalui besarnya pengeluaran dalam suatu rumah tangga dalam suatu jangka waktu tertentu, baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan

porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Barito Kuala. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran perkapita di Barito Kuala sebesar Rp. 1.253.516 per bulan, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang rata-ratanya sebesar Rp. 1.154.712 per bulan.

Jika dibagi per kelompok pengeluaran, rumah tangga yang berada pada kelompok 40% kebawah secara rata-rata mengeluarkan Rp. 698.004 tiap bulannya. Sementara itu, untuk rumah tangga yang berada pada kelompok 40% tengah memiliki pengeluaran Rp.

1.136.664 per bulan dan mereka yang berada pada kelompok pengeluaran 20% tertinggi mengeluarkan sejumlah Rp. 2.599.054 tiap bulannya. Lebih lanjut, pengeluaran per kapita dapat dilihat juga berdasarkan kelompok pengeluaran makanan dan bukan makanan.



Sumber: Olah Susenas 2019-2023, Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s.d. 2023

Seperti yang terlihat pada gambar 7.1, sepanjang periode 2019-2023 terlihat bahwa pengeluaran per kapita untuk makanan selalu lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita untuk makanan di Barito Kuala sebesar 55,06 persen, menurun dari tahun 2022 yang proporsinya 56,02 persen. Seiring dengan penurunan ini, pengeluaran non makanan pada tahun 2023 meningkat dari yang sebelumnya 43,98 persen di tahun 2022 menjadi 44,94 persen. Jika dilihat tren kedua kelompok tersebut dari tahun 2019-2023, pengeluaran per kapita baik makanan maupun non makanan di Barito Kuala cukup fluktuatif meskipun secara umum

memiliki tren yang positif untuk pengeluaran makanan per kapita. Selain dikelompokkan menjadi makanan dan non makanan, pengeluaran per kapita juga dapat dirinci menurut komoditas jenis pengeluaran.

Tabel 7.1 Nilai dan Persentase Pengeluaran Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala, 2022-2023

JENIS PENGELUARAN	Rata-rata Pengeluaran (Rp)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAKANAN	646 892	690 174	56,02	55,06
A. Padi-padian	85 038	114 947	7,36	9,17
B. Umbi-umbian	4 208	4 382	0,36	0,35
C. Ikan/udang/cumi	81 848	75 871	7,09	6,05
D. Daging	20 879	19 636	1,81	1,57
E. Telur & Susu	29 687	34 117	2,57	2,72
F. Sayur-sayuran	42 735	40 237	3,70	3,21
G. Kacang-kacangan	9 291	9 019	0,80	0,72
H. Buah-buahan	20 763	21 319	1,80	1,70
I. Minyak dan lemak	22 851	16 405	1,98	1,31
J. Bahan minuman	24 972	22 848	2,16	1,82
K. Bumbu-bumbuan	16 902	14 197	1,46	1,13
L. Konsumsi lainnya	15 480	14 202	1,34	1,13
M. Makanan dan minuman jadi	202 978	217 243	17,58	17,33
N. Rokok dan tembakau	69 260	85 750	6,00	6,84
NON MAKANAN	507 820	563 342	43,98	44,94
O. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	279 711	291 742	24,22	23,27
P. Aneka barang & jasa	105 415	117 523	9,13	9,38
Q. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	31 936	31 846	2,77	2,54

R. Barang tahan lama	46 172	53 175	4,00	4,24
S. Pajak, pungutan, dan asuransi	36 064	40 809	3,12	3,26
T. Keperluan pesta dan upacara	8 521	28 248	0,74	2,25
BARITO KUALA	1 154 712	1 253 516	100,00	100,00

Sumber: Olah Susenas 2022-2023, Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 7.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 pengeluaran per kapita makanan didominasi oleh pengeluaran makanan jadi dengan proporsi masing-masing sebesar 17,58 dan 17,33 persen. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran makanan jadi per kapita adalah Rp. 217.243 per bulan. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai di tahun 2022 yang mencapai Rp. 202.978. Jenis komoditas selanjutnya yang memiliki proporsi cukup besar adalah padi-padian. Pada tahun 2023, kelompok komoditas ini memiliki proporsi sebesar 9,17 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menyumbang 7,36 persen dari total pengeluaran. Konsumsi bahan makanan terbesar selanjutnya ada pada kelompok ikan/udang/cumi dengan nilai sebesar 6,05 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,09 persen. Lebih lanjut, kelompok makanan terbesar selanjutnya adalah rokok yang pada tahun 2023 persentasenya meningkat, yang sebelumnya sebesar 6,00 persen di tahun 2022 menjadi sebesar 6,84 persen di tahun 2023.

Pada kelompok non makanan, pembiayaan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga memiliki proporsi terbesar yaitu mencapai 23,27 persen di tahun 2023. Nilai ini secara tren sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 24,22 persen. Peningkatan porsi komoditas non makanan dibandingkan secara total dibandingkan komoditas makanan di Barito Kuala mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, perekonomian kembali membaik setelah pandemi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.2 Distribusi Pendapatan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* (pendekatan) pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak hasilnya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tabel 7.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 s.d. 2023

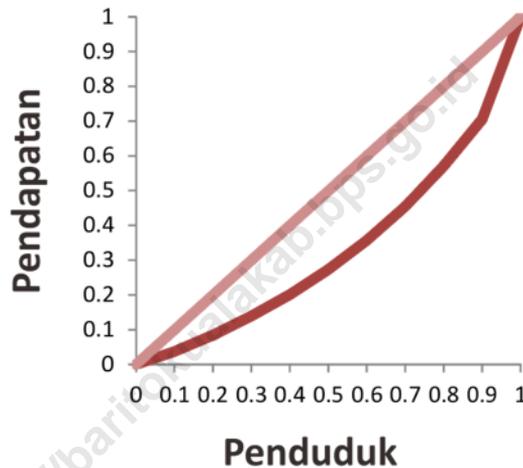
Tahun	40 % [Bawah]	40 % [Tengah]	20 % [Atas]	Gini Ratio (Indeks Gini)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	20,13	36,98	42,89	0,34
2015	19,27	35,55	45,18	0,36
2016	21,29	39,04	39,67	0,31
2017	22,35	37,23	40,42	0,31
2018	14,35	26,00	59,63	0,34
2019	16,27	28,73	55,00	0,34
2020	16,82	29,04	54,13	0,28
2021	16,76	27,48	55,75	0,28
2022	16,69	26,79	56,51	0,28
2023	17,01	26,66	56,33	...

Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data pada Tabel 7.2., untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala, dapat dihitung bahwa pada tahun 2023, 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah memiliki proporsi pengeluaran per kapita sebesar 17,01 persen dari total pengeluaran per kapita seluruh penduduk di Barito Kuala. Sementara itu, kelompok menengah menyumbang 26,66 persen dan kelompok pengeluaran 20% keatas menyumbang lebih dari setengah yaitu 56,33 persen dari total pengeluaran per kapita per bulan. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 dianggap rendah karena pada kelompok pengeluaran terendah, persentasenya diantara di atas 17 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang

angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang tajam dan cukup serius, dan jika rasio berkisar antara 0,30–0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 sebesar 0,28. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Barito Kuala cukup merata. Sementara itu, angka rasio gini tahun 2022 belum tersedia.

7.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pertama SDGs yang berbunyi mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun mempunyai target yaitu pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Tingkat kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dan untuk menentukan garis kemiskinan internasional tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masing-masing negara yang berbeda-beda.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi isu penting dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan berdampak pada pemenuhan aspek kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan serta sandang dan pangan. Hubungan ini seperti lingkaran setan dimana jika tidak diputus, akan tetap berlanjut bahkan tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi. Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas

utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antardaerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

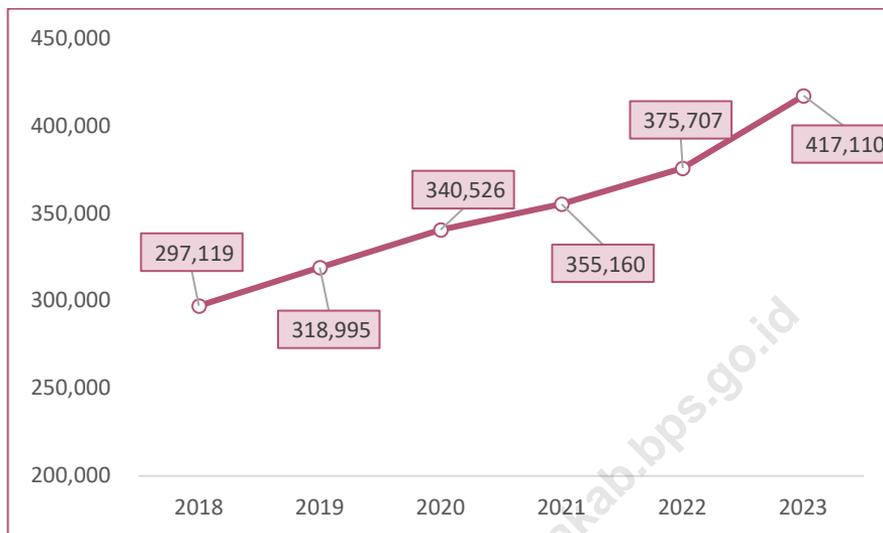
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran, ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan besaran garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala secara tren mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 seperti yang terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Hasil Olah Susenas, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala, 2018-2023

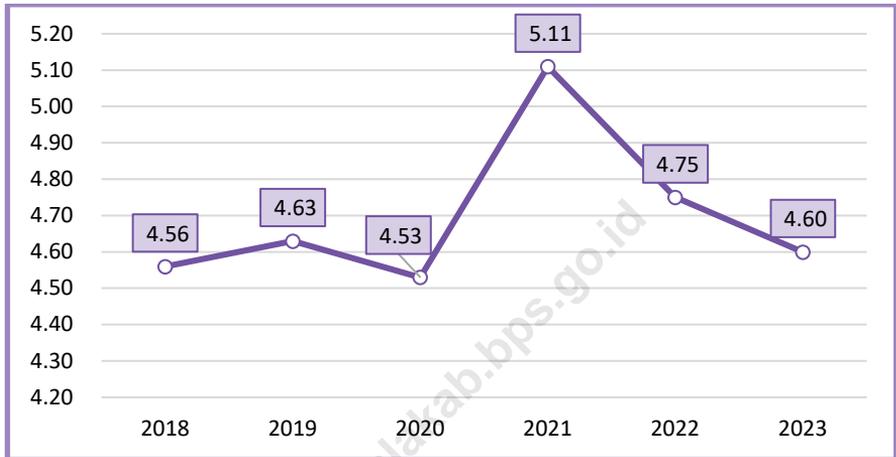
Pada tahun 2023, garis kemiskinan per kapita di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 375.707 . Hal ini berarti bahwa jika satu orang penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya per bulan kurang dari Rp. 340.526 dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan data garis kemiskinan yang diperoleh sebelumnya, persentase penduduk miskin dapat diperoleh. Secara umum, sejak tahun 2013 perkembangan persentase penduduk miskin di Barito Kuala mengalami penurunan, meskipun pada tahun tertentu mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, tercatat bahwa terdapat 4,56 persen penduduk miskin di Barito Kuala. Selama dua tahun berikutnya, proporsi penduduk miskin menurun hingga 4,53 persen. Akan tetapi, pada tahun 2021 persentasenya meningkat menjadi 5,11 persen. Tidak bisa dipungkiri, efek

pandemi Covid-19 turut andil dalam peningkatan jumlah penduduk miskin setelah adanya beberapa pembatasan yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setelah itu, penurunan kembali terjadi pada tahun 2022-2023 dan pada tahun 2023 menjadi 4,60 persen.



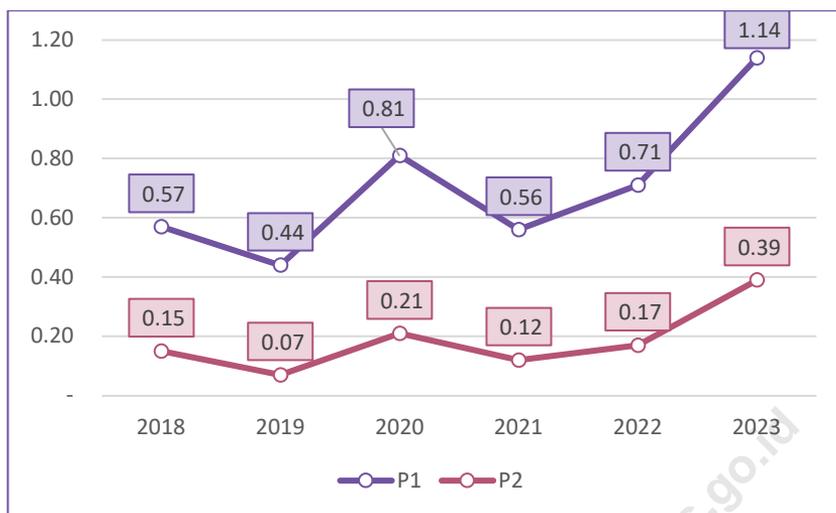
Sumber: Hasil Susenas BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2023

Turunnya angka kemiskinan di saat garis kemiskinan naik dibandingkan tahun 2021, mengindikasikan bahwa memang jumlah penduduk miskin berkurang. Akan tetapi, program pemerintah yang berfokus pada pengeluaran konsumsi masyarakat diharapkan terus dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Barito Kuala. Selain itu, pengendalian harga terutama bahan pokok juga perlu tetap dilakukan untuk tetap mempertahankan daya beli.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2023

Jika dilihat pada Gambar 7.4, pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,14. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, selama lima tahun angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,57 poin. Kenaikan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Meskipun secara persentase penduduk miskin menurun, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjaga agar penduduk-penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan tidak terlalu besar jaraknya dengan Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Barito Kuala pada tahun 2023 sebesar 0,39. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 dimana nilai P2 sebesar 0,17. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Barito Kuala. Perubahan angka indeks

ini cukup fluktuatif, tetapi secara keseluruhan selama lima tahun terakhir memiliki tren yang meningkat seperti yang terlihat pada Gambar 7.5 diatas. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan juga memiliki tren yang meningkat pada periode yang sama. Artinya, usaha pengentasan kemiskinan di Barito Kuala selain berfokus untuk mengurangi persentase kemiskinan (P0) juga harus memperhatikan agar masyarakat yang berada dibawah Garis Kemiskinan jaraknya tidak terlalu dalam dibawah, sekaligus memperkecil ketimpangan diantara penduduk miskin.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK³

#bercanggalmelayani
#bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. Jenderal Sudirman No 72 Marabahan, 70513
Telepon : +62 511 4799057, Fax : +62 511 4799057
Homepage: <http://www.bps.kabupatenbaritokuala.go.id>
Email: bps7014@bps.go.id

ISSN 2776-8376

